

SKRIPSI

PENGARUH KEANDALAN PELAPORAN KEUANGAN TERHADAP *AUDIT EXPECTATION GAP* (Studi Pemerintah Daerah Kab. Enrekang)

FATRIANSYAH



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2014**

SKRIPSI

PENGARUH KEANDALAN PELAPORAN KEUANGAN TERHADAP *AUDIT EXPECTATION GAP* (Studi Pemerintah Daerah Kab. Enrekang)

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**FATRIANSYAH
A31109006**



kepada

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2014**

SKRIPSI

PENGARUH KEANDALAN PELAPORAN KEUANGAN TERHADAP *AUDIT EXPECTATION GAP* (Studi Pemerintah Daerah Kab. Enrekang)

disusun dan diajukan oleh

FATRIANSYAH

A31109006

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, Oktober 2013

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Syarifuddin, S.E., M.Soc., Sc., Ak.
NIP. 196312101990021001

Dra. Hj. Nirwana, M.Si., Ak.
NIP. 196511271991032001

Ketua Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Hj. Kartini, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 1965030519920320

SKRIPSI

PENGARUH KEANDALAN PELAPORAN KEUANGAN TERHADAP AUDIT EXPECTATION GAP

(Studi Pemerintah Daerah Kab. Enrekang)

disusun dan diajukan oleh

FATRIANSYAH
A31109006

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 23 Januari 2014 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No. Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Dr. H. Syarifuddin, S.E., M.Soc., Sc., Ak.	Ketua	1.....
2. Dra. Hj. Nirwana, M.Si., Ak.	Sekretaris	2.....
3. Dr. H. Arifuddin, S.E., M.Si., Ak.	Anggota	3.....
4. Drs. Haerial, M.Si., Ak.	Anggota	4.....
5. Drs. Muh. Ashari, M.SA., Ak.	Anggota	5.....

Ketua Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

DR. Hj. Kartini, S.E., M.Si., Ak
NIP 1965050305 1992032 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Fatriansyah
NIM : A31109006
jurusan/program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa proposal yang berjudul

PENGARUH KEANDALAN PELAPORAN KEUANGAN TERHADAP *AUDIT EXPECTATION GAP*

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, Oktober 2013

Yang membuat pernyataan,

Fatriansyah

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi yang berjudul “Pengaruh Keandalan Pelaporan Keuangan terhadap Audit *Expectation Gap*” merupakan salah satu tugas dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang Strata Satu (S1) di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Salam dan salawat peneliti haturkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat yang telah membimbing umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh cahaya. Semoga suri tauladan beliau senantiasa mewarnai kehidupan kita.

Izinkanlah peneliti mengapresiasi dengan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Ucapan terima kasih ini peneliti berikan kepada:

1. Ayahanda Saipal Said dan Ibunda Ida Saini sebagai pembimbing utama dalam kehidupan peneliti. Orang tua yang telah mendidik dan membesarkan peneliti dengan penuh kasih sayang untuk menjadi anak yang taat kepada Allah SWT, berbakti kepada kedua orang tua, dan keluarga serta bermanfaat bagi masyarakat. Peneliti menyadari bahwa peneliti tidak akan mampu membalas jasa kedua orang tua dengan apapun sehingga rasa terima kasih ini tidaklah cukup untuk menggambarkan wujud penghargaan saya kepada Ayah dan Ibu yang telah memberikan segala hal yang terbaik kepada anaknya ini. Ucapan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada seluruh keluarga

besar peneliti dimanapun kalian berada, terima kasih atas doanya selama ini.

2. Bapak Dr. H. Syarifuddin, S.E., M.Soc., Sc., Ak. dan Dra. Hj. Nirwana, M.Si., Ak. atas kesediaannya untuk meluangkan waktunya memberikan arahan, motivasi, dan bimbingan dari awal hingga peneliti menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Yohanis Rura, S.E., M.SA, Ak. Selaku Penasehat Akademik peneliti, terima kasih atas semangat dan bimbingannya bagi peneliti selama ini mulai dari semester satu hingga selesainya peneliti menempuh studi.
4. Ibu Dr. Hj. Kartini, S.E., M.Si., Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
5. Bapak-Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang selama ini tak kenal lelah mentransfer ilmu khususnya kepada peneliti serta kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis secara keseluruhan, Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dan didikannya selama ini.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang, Kepala Kantor Inspektorat Kabupaten, dan Kepala Kantor Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah beserta staf/pegawai atas sikap kooperatifnya selama penelitian dilaksanakan.
7. Para pegawai Jurusan Akuntansi, pegawai akademik, pegawai kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan seluruh staf lainnya yang telah membantu peneliti dalam kelancaran urusan akademik. Terima kasih atas bantuannya.

8. Seluruh teman-teman yang telah menjadi saudara-saudaraku, teman berbagi ilmu pengetahuan, teman berbagi suka dan duka, teman berbagi pengalaman hidup dan teman yang selalu ada di saat kita butuhkan.
9. Seluruh teman-teman K09nitif yang tidak sempat disebut namanya terima kasih banyak karena telah banyak membantu, menyemangati, dan memberikan masukan kepada peneliti.
10. Kepada seluruh teman-teman di Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan namanya satu-satu. Terima kasih atas semua bantuannya.

Peneliti menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Semoga semua bantuan dari berbagai pihak yang telah diberikan kepada peneliti akan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Makassar, Oktober 2013

Peneliti

ABSTRAK

PENGARUH KEANDALAN PELAPORAN KEUANGAN TERHADAP *AUDIT EXPECTATION GAP*

(Studi Pemerintah Daerah Kab. Enrekang)

*The Effect of Financing Reporting Reliability to Expectation Gap of Auditing
(Study of Enrekang Government)*

Fatriansyah
Syarifuddin
Nirwana

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor keandalan pelaporan keuangan pemerintah terhadap *audit expectation gap*. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil pemeriksaan auditor atas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten enrekang yang memberikan opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*). Penelitian ini menggunakan sampel dari 60 responden yang terdiri dari 30 responden dari Kantor Inspektorat Kabupaten, 30 responden dari Kantor Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu, menyebarkan kuesioner, wawancara, dan Pengamatan (observasi). Metode analisis yang digunakan yaitu, metode analisis deskriptif, uji validitas dan uji reabilitas, analisis regresi linear sederhana, analisis pengujian hipotesis (uji t dan uji determinasi/KD). Pengolahan datanya dengan menggunakan program SPSS 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, faktor keandalan pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap *audit expectation gap*.

Kata Kunci: Keandalan Pelaporan Keuangan dan *Audit Expectation Gap*

This study purpose is to detect the effect of government financing reporting reliability to the audit expectation gap. This study's background by the result of auditing financing reporting by Enrekang government that serve a qualified opinion. This study using sample from 60 respondents comprise with 30 respondents from Regency Inspectorate and 30 respondents from the office of finance and asset manager. Data collecting method that using in this study are literature study and field study like interview and observation. Analyze method that using are descriptive method, validity and reliability test, linear regression analyze, hypothesis test (t-test and determination test/KD). Data tabulation using SPSS 20. The result of study show that financing reporting reliability affecting positively the expectation gap of auditing.

Keywords: *Reliability Financing Reporting and Expectation Gap Of Auditing*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	7
1.6 Organisasi/Sistematika	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Teori Agensi	9
2.2 Pelaporan Keuangan Pemerintah	10
2.2.1 Peranan Pelaporan Keuangan	12
2.2.2 Tujuan Pelaporan Keuangan	13
2.2.3 Nilai Informasi Pelaporan Keuangan	14
2.3 Audit Sektor Publik	16
2.3.1 Definisi Audit	16
2.3.2 Jenis Audit.....	18
2.3.3 Asersi Manajemen dan Tujuan Audit.....	19
2.3.4 Tipe Auditor	20
2.3.5 Peran dan Tanggung Jawab Auditor	21
2.3.6 Opini Audit (<i>Opinion Audit</i>)	22
2.4 <i>Expectation Gap</i>	24
2.4.1 Definisi <i>Expectation Gap</i>	25
2.4.2 Jenis-Jenis <i>Expectation Gap</i>	26
2.4.3 Masalah Sehubungan <i>Expectation Gap</i>	28
2.5 Penelitian Terdahulu	29
2.6 Kerangka Pikir.....	32
2.7 Hipotesis Penelitian.....	33

BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Rancangan Penelitian	35
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	35
3.3 Populasi dan Sampel	36
3.4 Jenis dan Sumber Data	36
3.5 Teknik Pengumpulan Data	37
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasionalisasi	38
3.7 Instrumen Penelitian	39
3.8 Analisis Data	40
3.8.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	40
3.8.2 Uji Instrumen Pengumpulan Data.....	41
3.8.3 Analisis Regresi Linear Sederhana	42
3.8.4 Analisis Pengujian Hipotesis	42
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 44
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	44
4.1.1 Data Umum Inspektorat Kab. Enrekang	44
4.1.2 Data Umum DPKAD	47
4.2 Deskripsi Hasil Penelitian	49
4.2.1 Jenis Kelamin	49
4.2.2 Pendidikan Terakhir.....	50
4.2.3 Usia	50
4.2.4 Lama Bekerja	50
4.2.5 Penyebaran dan Penerimaan Kuesioner	51
4.3 Pembahasan	51
4.3.1 Deskripsi Variabel Penelitian	51
4.3.2 Uji Validitas.....	56
4.3.3 Uji Reabilitas	57
4.4 Pengujian Hipotesis	58
4.4.1 Analisis Linear Sederhana.....	58
4.4.2 Uji t.....	50
4.4.3 Uji Determinasi	61
 BAB V PENUTUP	 62
5.1 Kesimpulan	62
5.2 Keterbatasan.....	62
5.2 Saran	63
 DAFTAR PUSTAKA	 64
 LAMPIRAN	 67

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Instrumen Penelitian	39
4.2 Jenis Kelamin Responden	49
4.3 Pendidikan Terakhir Responden.....	50
4.4 Usia Responden	50
4.5 Lama Bekerja Responden	50
4.6 Daftar penyebaran Kuesioner	51
4.7 Tanggapan Responden terhadap Variabel X.....	52
4.8 Tanggapan Responden terhadap Variabel Y	54
4.9 Uji Validitas Variabel X	56
4.10 Uji Validitas Variabel Y	57
4.11 Uji Reabilitas Variabel X	58
4.12 Uji Reabilitas Variabel Y	58
4.13 Uji Regresi Linear Sederhana.....	59
4.14 Uji t	60
4.15 Koefisien Determinasi.....	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran	33

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	Kuesioner Penelitian.....	67
2	Data Output SPSS.....	73

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah sudah berjalan sepuluh tahun, akan tetapi tujuan utama dari otonomi daerah belum terpenuhi secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Hal tersebut, ditandai munculnya berbagai fenomena dalam perkembangan sektor publik dengan semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi publik seperti, pemerintah pusat/daerah, unit-unit kerja pemerintah, serta departemen dan lembaga-lembaga negara. Tuntutan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik terkait perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik (Mardiasmo, 2002:20).

Mardiasmo (2002:20) menyatakan akuntabilitas publik adalah

“Kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”.

Pemerintah merespon tuntutan akuntabilitas tersebut dengan menyusun laporan keuangan. Sesuai PP. Nomor 24 Tahun 2005 yang diganti menjadi PP. Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, bahwa pemerintah wajib menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD/APBN, yaitu laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), laporan finansial, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran

Lebih (Laporan Perubahan SAL), sedangkan Laporan Finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah, sekarang setiap daerah dibentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sesuai PP. No 24 Tahun 2005 wajib menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), kemudian diganti menjadi PP. No 71 Tahun 2010 yang menyajikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK),

Oleh karena itu, pemerintah perlu memperhatikan kualitas dari laporan keuangan. Kriteria untuk menilai kualitas laporan keuangan adalah dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan.

Kenyataan di lapangan, kualitas informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) masih banyak disajikan data yang tidak sesuai. Hal ini, dapat dilihat pada LKPD Kabupaten Enrekang, hasil pemeriksaan Kantor Inspektorat Daerah yaitu BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian selama 6 tahun terakhir. Berdasarkan fenomena yang terjadi pada LKPD Kabupaten Enrekang tersebut dapat disimpulkan, bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah masih belum memenuhi kriteria nilai informasi yang disyaratkan yaitu keandalan.

Kebutuhan informasi mengenai laporan keuangan yang semakin tinggi, sehingga pemakai laporan keuangan menuntut laporan keuangan hasil audit yang dapat dipercaya, menyediakan informasi yang lebih lengkap dan benar. Informasi laporan keuangan tidak hanya berpengaruh dan dipakai oleh instansi

pemerintah tetapi juga masyarakat luas. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) bertanggung jawab atas laporan keuangan pemerintah, sedangkan akuntan publik (auditor) bertanggung jawab atas opini audit dari jasa audit yang dilakukan. Pemerintah memerlukan jasa auditor agar pertanggungjawaban keuangan yang disajikan untuk pemakai laporan keuangan dapat dipercaya, sedangkan pemakai laporan keuangan memerlukan jasa auditor untuk memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan (Ramdhani, 2012:16).

Adanya kebutuhan akan jasa auditor untuk menilai keandalan pertanggungjawaban keuangan yang disajikan, maka timbul kebutuhan akan jasa profesi akuntan publik. Akuntan publik diharapkan mampu memberikan penilaian yang bebas tidak memihak terhadap siapapun baik itu pemakai, ataupun penyusun laporan keuangan. Ketidakmampuan auditor mengungkapkan dan menginformasikan kekeliruan dapat mempengaruhi penilaian publik/pemakai laporan keuangan terhadap kinerja auditor dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Kinerja auditor dapat diketahui dengan melihat kesuksesan mereka dalam melaksanakan aktivitas-aktivitasnya dalam rangka melaksanakan tugas audit. Tuntutan untuk meningkatkan profesionalitas auditor mengharuskan praktik akuntansi yang sehat (Ramdhani, 2012:18).

Terdapat berbagai kasus yang memperlihatkan bahwa auditor gagal mendeteksi dan mengungkapkan kegagalan atau tindakan penyimpangan dari perusahaan menyebabkan turunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap profesi auditor. Contoh kasus yang melibatkan profesi auditor misalnya, kasus Enron dan KAP Artur Andersen, auditor memiliki dua peran yang seharusnya tidak dilakukan yaitu auditor sekaligus konsultan bisnis Enron.

Kasus Enron diketahui terjadi manipulasi laporan keuangan dengan mencatat keuntungan 600 juta Dollar AS padahal perusahaan mengalami kerugian. Manipulasi keuntungan disebabkan keinginan perusahaan agar saham tetap diminati investor, KAP yang seharusnya bisa bersikap independen tidak dilakukan oleh KAP Arthur Andersen. Seorang akuntan dalam melaksanakan tugasnya harus mengikuti standar profesi yang mengutamakan kepentingan publik, misalnya: auditor independen membantu memelihara integritas dan efisiensi dari laporan keuangan yang disajikan kepada lembaga keuangan untuk mendukung pemberian pinjaman dan kepada pemegang saham untuk memperoleh modal, sedangkan auditor intern memberikan keyakinan tentang sistem pengendalian internal yang baik untuk meningkatkan keandalan informasi keuangan dari pemberi kerja kepada pihak luar. Hal ini memberikan gambaran bahwa *expectation gap* lebih disebabkan karena kegagalan profesi akuntan publik untuk bereaksi dan berkembang agar tidak tertinggal oleh perubahan bisnis dan lingkungan sosial (Yuliati dkk, 2007:6).

Harapan para pemakai laporan keuangan terhadap hasil audit laporan keuangan terkadang melebihi apa yang menjadi peran dan tanggung jawab auditor. Semakin banyaknya tuntutan masyarakat mengenai profesionalisme auditor menunjukkan besarnya *expectation gap* (Yeni, 2000 dalam Aristania, 2011). *Expectatioan gap* terjadi ketika ada perbedaan antara apa yang masyarakat atau pemakai laporan keuangan harapkan dari auditor dan apa yang sebenarnya dilakukan auditor (Rusliyawati dan Halim, 2009:3).

Penelitian yang dilakukan oleh Kho (2010) membuktikan adanya *expectation gap* antara auditor dengan pemakai laporan keuangan mengenai tanggung jawab auditor terhadap *illegal act klien* dan memperbaiki keefektifan audit. Pada faktor tanggung jawab *illegal act klien*, harapan pemakai laporan

keuangan (bank) melebihi apa yang dilakukan atau dipersepsikan auditor, sedangkan terhadap faktor memperbaiki keefektifan audit, pemenuhan tanggung jawab oleh auditor melebihi dari apa yang diharapkan pemakai laporan keuangan (bank). Pemakai laporan keuangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah para pengguna laporan keuangan dari sektor swasta (investor dan kreditor).

Expectation gap tidak hanya terjadi dalam lingkungan audit sektor swasta. *Expectation gap* pun terjadi di lingkungan audit sektor publik, mengingat sektor publik pun turut menggunakan laporan keuangan pemerintah. Adapun para pemakai laporan keuangan pemerintah adalah masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan pemberi donasi. Auditor pemerintah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu auditor internal dan eksternal. Auditor internal merupakan unit pemeriksa yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi. Auditor internal terdiri dari Inspektorat Jenderal Departemen, Satuan Pengawas Intern (SPI) di lingkungan lembaga negara dan BUMN/BUMD, Inspektorat Wilayah Provinsi (ITWILPROV), Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kota (ITWILKAB/ITWILKOT) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sedangkan auditor eksternal yaitu Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang merupakan lembaga pemeriksa independen. Audit eksternal sendiri merupakan unit pemeriksa yang berada diluar organisasi yang diperiksa (Murwanto dkk, 2002:32).

Penelitian mengenai keberadaan *expectation gap* di sektor swasta lebih banyak dilakukan, namun penelitian mengenai keberadaan *expectation gap* di sektor publik masih jarang dilakukan, penelitian Yuliati dkk (2007) menunjukkan bahwa: (1) terdapat *expectation gap* antara pemakai laporan keuangan pemerintah dan auditor pemerintah mengenai peran dan tanggung jawab auditor pemerintah. Auditor pemerintah mempunyai persepsi yang lebih tinggi terhadap

peran dan tanggung jawabnya dibanding pemakai laporan keuangan pemerintah, (2) tidak terdapat *expectation gap* antara pemakai laporan keuangan dan auditor pemerintah mengenai peran dan tanggung jawab auditor pemerintah pada faktor mendeteksi, melaporkan kecurangan, faktor mempertahankan sikap independensi, dan (3) terdapat *expectation gap* antara pemakai laporan keuangan dan auditor pemerintah mengenai peran dan tanggung jawab auditor pemerintah pada faktor mengkomunikasikan hasil audit dan memperbaiki keefektifan audit. Auditor pemerintah mempunyai persepsi yang lebih tinggi untuk memperbaiki keefektifan audit.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas tentang ***“Pengaruh Keandalan Pelaporan Keuangan terhadap Audit Expectation Gap”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah penelitian tersebut adalah apakah faktor keandalan pelaporan keuangan pemerintah berpengaruh terhadap *audit expectation gap*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh faktor keandalan pelaporan keuangan pemerintah terhadap *audit expectation gap*.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi.

- a. Pemakai Laporan Keuangan Pemerintah dan Auditor Pemerintah, agar para pemakai laporan keuangan dapat lebih memahami akan hasil pemeriksaan yang telah dikeluarkan oleh auditor pemerintah sebagai dasar pengambilan keputusan, dan juga agar para auditor dapat lebih mengerti akan apa yang menjadi tuntutan bagi para pemakai laporan keuangan tersebut.
- b. Dunia penelitian dan bidang akademis, dapat menambah literatur mengenai pengaruh keandalan pelaporan keuangan terhadap *audit expectation gap* yang terjadi pada sektor publik, dan juga diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi pemicu bagi peneliti di masa yang akan datang agar dapat melakukan penelitian yang lebih baik lagi.
- c. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan dan wawasan khususnya mengenai keandalan pelaporan keuangan dan *expectation gap* pada sektor publik.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini, mencoba mengungkapkan pengaruh keandalan pelaporan keuangan terhadap *audit expectation gap*, dengan mengambil responden dari kalangan pemakai laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang. Pemakai laporan keuangan yaitu Pegawai Kantor Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD), auditor internal yaitu Pegawai Kantor Inspektorat Kabupaten.

1.6 Organisasi/Sistematika

Organisasi/Sistematika penelitian ini terdiri dari 5 bagian, yaitu Bab 1 Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metodologi Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasannya, serta Bab V Penutup.

- | | |
|---------|---|
| BAB 1 | Latar Belakang |
| | Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian dan organisasi/sistematika. |
| BAB II | Tinjauan Pustaka |
| | Bab ini membahas tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis. |
| BAB III | Metodologi Penelitian |
| | Bab ini berisi tentang rancangan penelitian, tempat dan waktu, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, dan analisis data. |
| BAB IV | Hasil dan Pembahasan |
| | Bab ini berisi tentang deskripsi dari objek penelitian, analisis data, dan pembahasan atas hasil analisis data. |
| BAB V | Penutup |
| | Bab ini berisi penjelasan mengenai kesimpulan dari hasil yang diperoleh setelah dilakukan penelitian. Selain itu, disajikan keterbatasan serta saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya. |

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Scott (1997) dalam Rayu (2011) menyatakan dalam teori agensi muncul adanya pemisahan antara pemilik dengan manajemen. Pemilik atau pemegang saham sebagai *prinsipal*, sedangkan manajemen sebagai *agent*, dan ditambah dengan auditor sebagai pihak ketiga. Aplikasi teori agensi dapat terwujud dalam kontrak kerja yang mengatur tentang proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tetap memperhitungkan manfaat secara keseluruhan. Inti dari teori agensi adalah pendesaian kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan *prinsipal* dan *agent* dalam hal terjadinya pertentangan.

Menurut Boyton *et al.*, (2001:53) kebutuhan akan audit laporan keuangan diawali dengan adanya pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), banyak pemakai laporan keuangan memberikan perhatian tentang adanya pertentangan kepentingan aktual ataupun potensial antara pemakai laporan keuangan sendiri maupun antara pemakai laporan keuangan dengan manajemen. Kekhawatiran ini berkembang menjadi ketakutan bahwa laporan keuangan serta data telah disusun sedemikian rupa oleh manajemen sehingga menjadi bias. Pertentangan kepentingan juga dapat terjadi diantara berbagai kelompok pemakai laporan keuangan sendiri, seperti kreditur dengan investor, maka pemakai laporan keuangan mencari keyakinan dari pihak ketiga (auditor) untuk memastikan bahwa:

1. laporan keuangan telah bebas dari bias untuk kepentingan manajemen.
2. laporan keuangan telah netral untuk kepentingan berbagai kelompok pemakai laporan keuangan.

Kegagalan audit, skandal keuangan, dan tingginya kepercayaan yang diberikan kepada auditor, menimbulkan kesenjangan harapan dalam audit. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan harapan antara masyarakat pemakai jasa audit dengan auditor, mengenai peran dan tanggung jawab auditor dalam melaksanakan pekerjaannya. Kaplan (2000) dalam Ramdhani (2012:25) menyatakan bahwa masyarakat pemakai jasa audit mempunyai harapan yang sangat tinggi mengenai fungsi auditor sebagai pengawas publik (*public watch dog*) bagi mereka. Dalam kenyataannya auditor sulit memenuhi fungsi tersebut, karena berbagai hambatan yang ada baik secara institusional maupun kultur organisasi.

2.2 Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diganti menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, yaitu.

- a) Pemerintah pusat,
- b) Pemerintah daerah,

- c) Satuan organisasi dilingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penugasan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yuridikasi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

Pemerintah daerah untuk menggambarkan posisi keuangan adalah dengan menyajikan laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil refleksi dari sekian banyak transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan. Transaksi dan peristiwa yang bersifat *financial* dicatat, digolongkan, dan diringkaskan dengan cara setepat-tepatnya dalam satuan uang, dan kemudian diadakan penafsiran untuk berbagai tujuan. Berbagai tindakan tersebut tidak lain adalah proses akuntansi yang pada hakikatnya merupakan seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan peristiwa, yang setidaknya sebagian bersifat *financial*, dalam cara yang tepat dan dalam bentuk rupiah, dan penafsiran akan hasil-hasilnya (Jumingan, 2006:4).

Laporan keuangan pada dasarnya adalah asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan (Jumingan, 2006:4).

Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang mengkomunikasikan keadaan keuangan dari hasil operasi perusahaan dalam periode tertentu kepada pihak-pihak yang berkepentingan sehingga manajemen mendapatkan informasi yang bermanfaat (Kartika, 2009:3).

2.2.1 Peranan Pelaporan Keuangan

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diganti menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa peranan pelaporan untuk kepentingan.

a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan secara periodik.

b) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan, sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak

untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan pada peraturan perundang-undangan.

d) Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

2.2.2 Tujuan Pelaporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diganti menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan,

- a) menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b) menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c) menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d) menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

- e) menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode tertentu.

Jadi tujuan umum pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas dari suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai (*wide range users*) dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dipakai suatu entitas dalam aktivitas mencapai tujuannya, untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dan cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas suatu entitas pelaporan (Bastian, 2006:247).

2.2.3 Nilai Informasi Pelaporan Keuangan

Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai agar informasi tersebut dapat mendukung dalam pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai, maka informasi akuntansi harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah (Harahap, (2002:39) sebagai berikut.

- 1) Relevan yaitu informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur berikut.
 - a. Manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
 - b. Manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
 - c. Tepat waktu (*timeliness*). Penyajian informasi yang sesuai standar waktu yang ditetapkan. Apabila informasi yang diterima oleh pengguna laporan keuangan tidak tepat waktu, maka informasi tersebut tidak memiliki nilai. Akibatnya, akan berdampak dalam proses pengambilan keputusan.
 - d. Lengkap, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.
- 2) Andal yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut.

- a. Penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
 - b. Dapat diverifikasi (*verifiability*). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
 - c. Netralitas, yaitu informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
- 3) Dapat dibandingkan yaitu Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
 - 4) Dapat dipahami yaitu Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

2.3 Audit Sektor Publik

2.3.1 Definisi Audit

Telah menjadi pembicaraan luas, auditing merupakan suatu investigasi independen terhadap beberapa aktivitas khusus. Mekanisme audit merupakan sebuah mekanisme yang dapat menggerakkan makna akuntabilitas di dalam pengelolaan sektor pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau instansi pengelolaan aset negara lainnya. Pada audit sektor publik, selain melakukan *financial dan compliance audit*, juga perlu dilakukan *performance*

audit yang meliputi audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Audit sektor publik harus melaporkan *fraud* dan korupsi yang ada, serta berusaha mencegah hal tersebut terjadi. Istilah lain untuk *performance audit* adalah audit kinerja atau *for money audit* (Mardiasmo, 2002:179).

Audit kinerja yang meliputi audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, pada dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Audit kinerja memfokuskan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit. Defenisi audit kinerja adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif, agar dapat melakukan penilaian secara independen atas ekonomi dan efisiensi operasi, efektivitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan, dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan dan hukum yang berlaku, menentukan kesesuaian antara kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut (Mardiasmo, 2002:179).

Messier *et al.*, (2006:16) menyatakan bahwa:

“Auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara efektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan”.

Auditing pajak atau auditing keuangan menurut Bastian (2003:51) adalah

“suatu proses sistematis secara objektif penyediaan dan evaluasi bukti- bukti yang berkenaan dengan asersi tentang kegiatan dan kejadian ekonomi guna memastikan derajat atau tingkat hubungan antara asersi tersebut dengan kriteria yang ada serta mengkomunikasikan hasil yang diperoleh tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan”.

Auditing menurut Boyton *et al.*, (2001:5) adalah

“suatu proses sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi kegiatan dan peristiwa ekonomi, dengan tujuan menetapkan derajat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan”.

Jadi dapat disimpulkan bahwa auditing adalah suatu bentuk proses dan pengevaluasian bukti audit yang dilakukan secara sistematis yang dilakukan oleh pihak independen untuk mencapai tujuan dalam mengeluarkan pendapat atas kewajaran dalam suatu laporan keuangan.

2.3.2 Jenis Audit

Menurut Arens *and* Loebbecke (1996:1) Auditing umumnya digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu sebagai berikut.

a. Audit laporan keuangan (*financial statement audit*)

Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Dalam audit laporan keuangan ini, auditor independen menilai kewajaran laporan keuangan atas dasar kesesuaian prinsip akuntansi berterima umum. Hasil auditing terhadap laporan keuangan tersebut disajikan dalam bentuk tertulis berupa laporan audit, laporan audit ini yang dibagikan kepada pemakai informasi keuangan seperti pemegang saham, kreditur, dan kantor pelayanan pajak.

b. Audit kepatuhan (*compliance audit*)

Audit kepatuhan adalah audit yang tujuannya untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit

kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak berwenang membuat kriteria.

c. *Audit operasional (operational audit)*

Audit operasional merupakan review secara sistematis kegiatan organisasi dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Tujuan audit operasional adalah untuk.

- 1) Mengevaluasi kinerja,
- 2) Mengidentifikasi kesempatan,
- 3) Membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut.

2.3.3 Asersi Manajemen dan Tujuan Audit

Menurut Mulyadi dan Kanaka (1998:69) tujuan audit atas laporan keuangan adalah untuk menyatakan pendapat apakah laporan keuangan klien disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan akuntansi berterima umum, karena kewajaran laporan keuangan sangat ditentukan integritas berbagai asersi manajemen dalam laporan keuangan, maka hubungan antara asersi manajemen dengan tujuan umum audit, yaitu sebagai berikut.

a) *Asersi keberadaan dan keterjadian*

Asersi tentang keberadaan atau keterjadian berhubungan dengan apakah aktiva atau utang entitas ada pada tanggal tertentu dan apakah transaksi yang dicatat telah terjadi selama periode tertentu.

b) *Asersi kelengkapan*

Asersi tentang kelengkapan berhubungan dengan apakah semua transaksi dan akun yang seharusnya telah disajikan dalam laporan keuangan.

c) Asersi hak dan kewajiban

Asersi hak dan kewajiban berhubungan dengan apakah aktiva merupakan hak perusahaan dan utang merupakan kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu

d) Asersi penilaian atau alokasi

Aseri tentang penilaian atau alokasi berhubungan dengan apakah komponen-komponen aktiva, kewajiban, pendapatan dan biaya sudah dicantumkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya.

e) Asersi penyajian dan pengungkapan

Asersi tentang penyajian dan pengungkapan berhubungan dengan apakah komponen-komponen tertentu laporan keuangan diklasifikasikan, dan diungkapkan semestinya.

2.3.4 Tipe Auditor

Menurut Arens *and* Loebbecke (1996:6) Orang atau kelompok orang yang melaksanakan audit dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu sebagai berikut.

- 1) Auditor Independen adalah auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Audit tersebut terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai informasi keuangan seperti: kreditur, investor, calon kreditur, dan instansi pemerintah.
- 2) Auditor Pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit

organisasi/entitas pemerintah atau pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah, meskipun banyak auditor yang bekerja di instansi pemerintahan

- 3) Audit Intern adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan negara maupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai organisasi.

2.3.5 Peran dan Tanggung Jawab Auditor

Auditor mempunyai peran yang sangat strategis dan tanggung jawab yang sangat penting. Pendapat yang dinyatakan auditor akan berguna bagi pihak pemakai laporan keuangan hasil auditan untuk membuat keputusan ekonomi. Boyton *et al.*, (2001:66) menyatakan bahwa masyarakat dan para pemakai laporan keuangan yakin bahwa auditor seharusnya bersikap.

1. Lebih bertanggungjawab dalam mendeteksi dan melaporkan kecurangan (*fraud*) dan tindakan-tindakan ilegal (*illegal act*).
2. Meningkatkan efektivitas audit yaitu meningkatkan deteksi terhadap kekeliruan yang material.
3. Mengkomunikasikan kepada para pemakai laporan keuangan informasi yang lebih bermanfaat tentang sifat dan hasil dari suatu proses audit, termasuk peringatan dini mengenai kegagalan bisnis (*business failure*).

4. Berkomunikasi secara jelas dengan komite atau pihak-pihak lain yang berkepentingan atau bertanggungjawab terhadap reliabilitas laporan keuangan.

2.3.6 Opini Audit (*Opinion Audit*)

Menurut Mulyadi dan Kanaka (1998:18) ada 4 tipe pokok laporan audit yang diterbitkan oleh auditor, yaitu sebagai berikut.

1. Pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*). Pendapat wajar tanpa pengecualian diberikan oleh auditor jika tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit dan tidak terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi berterima umum dalam penyusunan laporan keuangan, konsistensi penerapan prinsip akuntansi berterima umum tersebut, serta pengungkapan memadai dalam laporan keuangan. Laporan audit yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian adalah laporan yang paling dibutuhkan oleh semua pihak, baik oleh klien, pemakai informasi keuangan, maupun oleh auditor. Kata wajar pada opini auditor mempunyai makna bebas dari keragu-raguan dan ketidakjujuran. Laporan keuangan dianggap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha suatu organisasi, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum, jika memenuhi kondisi berikut ini.
 - a) Prinsip akuntansi berterima umum digunakan untuk menyusun laporan keuangan.
 - b) Perubahan penerapan prinsip akuntansi berterima umum dari periode ke periode telah cukup menjelaskan.

- c) Informasi dalam catatan-catatan yang mendukungnya telah digambarkan dan dijelaskan dengan cukup dalam laporan keuangan, sesuai prinsip akuntansi berterima umum.
2. Laporan yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan (*unqualified opinion report with explanatory language*). Jika terdapat hal-hal yang memerlukan bahasa penjelas, namun laporan keuangan tetap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan klien, auditor dapat menerbitkan laporan audit bentuk baku ditambah bahasa penjelas.
 3. Pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*). Jika auditor menjumpai kondisi-kondisi berikut ini, maka auditor akan memberikan pendapat wajar dengan pengecualian dalam laporan audit.
 - a) Lingkup audit dibatasi oleh klien.
 - b) Auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting atau tidak dapat memperoleh informasi penting Karena kondisi-kondisi yang berada di luar kekuasaan klien maupun auditor.
 - c) Laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.
 - d) Prinsip akuntansi berterima umum yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tidak diterapkan secara konsisten.
 4. Pendapat tidak wajar (*adverse opinion*). Pendapat tidak wajar merupakan kebalikan pendapat wajar tanpa pengecualian. Akuntan memberikan pendapat tidak wajar jika laporan keuangan klien tidak disusun berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan saldo laba, dan arus kas perubahan klien. Auditor memberikan pendapat tidak

wajar jika ia tidak dibatasi lingkup auditnya, sehingga ia dapat mengumpulkan bukti kompeten yang cukup untuk mendukung pendapatnya. Jika laporan keuangan diberi pendapat tidak wajar oleh auditor, maka informasi yang disajikan oleh klien dalam laporan keuangan sama sekali tidak dapat dipercaya, sehingga tidak dapat dipakai oleh pemakai informasi keuangan untuk pengambilan keputusan.

5. Pernyataan tidak memberikan pendapat (*disclaimer of opinion*). Jika auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan, maka laporan audit ini disebut dengan laporan tanpa pendapat (*no opinion report*). Kondisi yang menyebabkan auditor menyatakan tidak memberikan pendapat adalah sebagai berikut.

- a) Pembatasan yang luar biasa sifatnya terhadap lingkup audit.

- b) Auditor tidak independen dalam hubungannya dengan klien.

Perbedaan antara pernyataan tidak memberikan pendapat dengan pendapat tidak wajar (*adverse opinion*) adalah pendapat tidak wajar ini diberikan dalam keadaan auditor mengetahui adanya ketidakwajaran laporan keuangan klien, sedangkan auditor menyatakan tidak memberikan pendapat (*no opinion*) karena ia tidak cukup memperoleh bukti mengenai kewajaran laporan keuangan auditan atau karena ia tidak independen dalam hubungannya dengan klien.

2.4 ***Expectation Gap***

Istilah *expectation gap* ditelusuri awal mula penggunaannya di AS pada tahun 1974 saat *America Institute of Certified Public Accountants (AICPA)* membentuk *commission on auditor's responsibilities* yang selanjutnya disebut

sebagai *cohen commission*. Komisi ini dibentuk untuk menanggapi kritik masyarakat mengenai kualitas kinerja auditor yang pada saat itu terdapat berbagai kasus yang memperlihatkan bahwa auditor gagal mendeteksi dan mengungkapkan kegagalan atau tindakan penyimpangan dari perusahaan yang dimiliki publik. Komisi ini bertugas secara khusus memberikan rekomendasi tentang tanggung jawab auditor yang tepat (sesuai dengan profesi). Menurut *cohen commission*, para pemakai laporan keuangan audit biasanya mempunyai harapan yang masuk akal tentang kemampuan auditor dan keyakinan yang dapat diberikan auditor. Hal ini memberikan gambaran bahwa *Expectation gap* lebih disebabkan karena kegagalan profesi akuntan publik untuk bereaksi dan berkembang agar tidak tertinggal oleh perubahan bisnis dan lingkungan sosial. (Yuliati dkk, 2007:6).

2.4.1 Definisi *Expectation GAP*

Menurut Guy and Sullivan (1988) dalam Adhikara (2012) "*expectation gap* adalah perbedaan antara apa yang masyarakat dan pengguna laporan keuangan percaya sebagai tanggung jawab akuntan dan auditor dan apa yang akuntan dan auditor percaya sebagai tanggung jawab", sedangkan menurut Glossary dalam Rusliyawati dan Halim (2008) "*expectation gap* adalah Kesenjangan (gap) antara standar kinerja auditor dan berbagai macam ekspektasi publik terhadap kinerja auditor".

Menurut Monroe and Woodliff (1993) dalam Gamaliel (2007) "*expectation gap* adalah perbedaan tingkat keyakinan antara auditor dan masyarakat tentang tugas dan tanggung jawab yang diasumsikan oleh auditor dan gambaran yang disampaikan oleh laporan audit", sedangkan menurut Jennings *et al.*,(1993)

dalam Adhikara (2012) "*expectation gap* adalah perbedaan antara apa yang masyarakat harapkan dari profesi pengauditan dan apa yang benar-benar disediakan oleh profesi pengauditan".

Menurut Liggio (1974) dalam Ramdhani (2012) "*expectation gap* adalah perbedaan persepsi antara akuntan independen dengan pemakai laporan keuangan auditan mengenai tingkat kinerja yang diharapkan (*expected performance*) dari profesi akuntan".

Jadi dapat disimpulkan *expectation gap* adalah perbedaan persepsi antara auditor dengan para pengguna laporan keuangan auditan.

2.4.2 Jenis-Jenis *Expectation GAP*

Secara umum, *expectation gap* menurut Robert (2004) dalam Gamaliel (2011), yaitu sebagai berikut.

- a) *Reporting gap*, yaitu terdapat perbedaan persepsi antara auditor dengan publik mengenai apa yang harus dilaporkan auditor.
- b) *Performance gap*, dimana apa yang dilakukan oleh auditor di bawah standar atau tidak sesuai dengan standar yang berlaku.
- c) *Liability gap*, dimana terjadi perbedaan persepsi antara auditor dengan publik mengenai kepada siapa auditor bertanggung jawab.

Porter (1993) dalam Wedari dan Indarto (2007) mengemukakan bahwa *expectation gap* yang terjadi terdiri atas dua komponen utama, yaitu sebagai berikut.

- a. *Reasonableness gap*, yaitu perbedaan yang timbul karena pemahaman publik terhadap apa yang diinginkan oleh publik kepada auditor untuk dilakukan, dan apa yang seharusnya auditor lakukan.

- b. *Performance gap*, yaitu perbedaan yang timbul akibat persepsi terhadap auditor dan hasil kinerja auditor, yang terdiri atas:
- a) *Deficient standard gap*, dimana standar auditing yang ada tidak mencukupi atau tidak mencakup semua aspek-aspek di dalam auditing.
 - b) *Deficient performance gap*, dimana kinerja auditor tidak sesuai dengan harapan publik.

Berdasarkan dua komponen di atas Porter (1993) dalam Rayu (2011) melakukan penelitian lanjutan dengan mengidentifikasi berbagai peran auditor ke dalam komponen-komponen di atas. Dalam penelitian tersebut, mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya *expectation gap* antara pemakai laporan keuangan dengan auditor karena adanya pemahaman yang berbeda mengenai:

1. Pelaksanaan audit.

Selama ini para pemakai laporan keuangan memiliki pemahaman bahwa audit dilaksanakan dengan memeriksa keseluruhan transaksi dari suatu perusahaan, padahal audit dilakukan dengan memeriksa sistem dan sampel-sampel transaksi dari laporan keuangan perusahaan tersebut yang dikategorikan sebagai material atau berisiko tinggi, yang bilamana terdapat adanya salah saji akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil.

2. Kualitas opini audit.

Opini auditor tidak menjamin bahwa penyajian laporan keuangan suatu perusahaan bebas dari salah saji material secara mutlak. Opini auditor hanya bisa memberikan suatu gambaran umum mengenai penyajian laporan keuangan yang bebas dari adanya salah saji yang material,

sehingga dapat Menambah keyakinan pemakai laporan keuangan tersebut terhadap reliabilitas laporan keuangan tersebut.

3. Opini auditor terhadap pengendalian internal dan kelangsungan hidup organisasi.

Opini yang dikeluarkan auditor tidak bisa dianggap sebagai ukuran cukup atau tidaknya efektivitas dan efisiensi dari suatu sistem pengendalian internal perusahaan, serta tidak bisa dianggap sebagai ukuran bahwa perusahaan akan berlangsung beroperasi terus-menerus.

2.4.3 Masalah sehubungan Expectation Gap

Guy *and* Sullivan (1998) dalam Rahmdhani (2007) mengemukakan adanya perbedaan harapan publik dalam hal.

1. Deteksi kecurangan dan tindakan ilegal,
2. Perbaikan keefektifan audit,
3. Pengkomunikasian hasil audit yang lebih intensif kepada publik dan komite audit.

Menurut Humphrey *et al.*, (1993) dalam Aristania (2011) mengemukakan ada 4 masalah sehubungan dengan *expectation gap*, yaitu sebagai berikut.

1. Tanggung jawab auditor untuk mendeteksi kecurangan,
2. Independensi auditor,
3. Maksud atau arti laporan audit,
4. Pelaporan kepentingan audit.

Menurut Humphrey *et al.*, (1993) dalam Djamil (2007) Kesenjangan harapan audit dapat diukur 4 dimensi, yaitu sebagai berikut:

1. Tanggung jawab auditor dalam mendeteksi,

2. Menemukan dan melaporkan kekeliruan dan ketidakberesan, terutama kecurangan (*responcibility*),
3. Keandalan dari laporan keuangan yang telah diaudit (*reability*),
4. Kegunaan laporan keuangan yang telah diaudit dalam pengambilan keputusan (*decision usefulness*).

2.5 Penelitian Terdahulu

1. Hasil penelitian yang dilakukan Yulianti dkk (2007) yang berjudul *Expectation Gap* antara Pemakai Laporan Keuangan Pemerintah dan Auditor Pemerintah yaitu, 1. Dari hasil analisis hipotesis menggunakan *independent sample t-test*, dapat diketahui bahwa terdapat *expectation gap* antara pemakai laporan keuangan pemerintah dan auditor pemerintah mengenai peran dan tanggung jawab auditor pemerintah. Auditor pemerintah mempunyai persepsi yang lebih tinggi terhadap peran dan tanggung jawabnya dibanding pemakai laporan keuangan pemerintah, 2. Hasil pengujian per faktornya menunjukkan bahwa:
 - a. Tidak terdapat *expectation gap* antara pemakai laporan keuangan pemerintah dan auditor pemerintah mengenai peran dan tanggung jawab auditor pemerintah pada faktor mendeteksi dan melaporkan kecurangan.
 - b. Tidak terdapat *expectation gap* antara pemakai laporan keuangan pemerintah dan auditor pemerintah mengenai peran dan tanggung jawab auditor pemerintah pada faktor mempertahankan sikap independensi.

- c. Terdapat *expectation gap* antara pemakai laporan keuangan pemerintah dan auditor pemerintah mengenai peran dan tanggung jawab auditor pemerintah pada faktor mengkomunikasikan hasil audit.
 - d. Terdapat *expectation gap* antara pemakai laporan keuangan pemerintah dan auditor pemerintah mengenai peran dan tanggung jawab auditor pemerintah pada faktor memperbaiki keefektivan audit. Auditor pemerintah mempunyai persepsi yang lebih baik daripada pemakai laporan keuangan pemerintah untuk memperbaiki keefektivan audit.
2. Hasil penelitian Rusliyawati dan Halim (2008) yang berjudul *Penginvestigasian Audit Expectation Gap* pada Sektor Publik, bahwa terdapat perbedaan persepsi antara auditor BPK dengan pengguna laporan keuangan daerah yaitu anggota DPRD, pemda, dan masyarakat dilihat dari audit kinerja, pendapat wajar, pelaporan auditor, kompetensi auditor, dan independensi auditor. Perbedaan persepsi yang terbesar terjadi antara DPRD dengan masyarakat. Hal ini menunjukkan eksistensi *expectation gap* diantara pengguna laporan keuangan daerah.
 3. Hasil penelitian Yulianthi (2013) yang berjudul *Expectation Gap* antara Auditor Pemerintah dan Pemakai Laporan Keuangan Pemerintah dilihat dari Latar Belakang Pendidikan dan Wilayah Bekerja terhadap Laporan Keuangan Auditan Pemerintah di Provinsi Bali, yaitu (1) terdapat *expectation gap* antara auditor pemerintah dan pemakai laporan keuangan pemerintah terhadap laporan keuangan auditan pemerintah di Provinsi Bali, (2) terdapat *expectation gap* antara pemakai laporan keuangan pemerintah yang berlatar belakang pendidikan akuntansi dengan pemakai laporan keuangan pemerintah yang tidak berlatar

belakang pendidikan akuntansi terhadap laporan keuangan auditan pemerintah di Provinsi Bali, (3) tidak terdapat *expectation gap* antara auditor pemerintah yang berlatar belakang pendidikan akuntansi dengan auditor pemerintah yang tidak berlatar belakang pendidikan akuntansi terhadap laporan keuangan auditan pemerintah di Provinsi Bali, (4) tidak terdapat *expectation gap* antara pemakai laporan keuangan pemerintah yang bertugas pada suatu wilayah dengan pemakai laporan keuangan pemerintah yang bertugas pada wilayah lainnya terhadap laporan keuangan auditan pemerintah di Provinsi Bali, (5) tidak terdapat *expectation gap* antara auditor pemerintah internal (Inspektorat) yang bertugas pada suatu wilayah dengan auditor pemerintah internal (Inspektorat) yang bertugas pada wilayah lainnya terhadap laporan keuangan auditan pemerintah di Provinsi Bali.

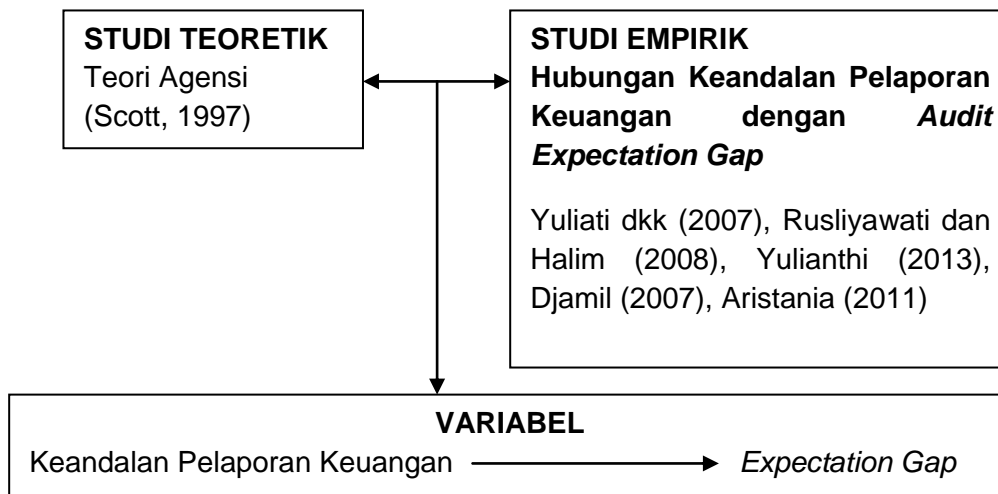
4. Hasil penelitian Djamil (2007) yang berjudul Persepsi Auditor dan Pemakai Jasa General Audit yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta tentang Tanggung Jawab Auditor, Keandalan, dan Kegunaan Laporan Keuangan Audit, yaitu terdapat *expectation gap* antara auditor dengan bankir, auditor dengan investor, dan auditor dengan manajemen tentang tanggung jawab auditor dalam mendeteksi dan melaporkan kecurangan (*responsibility*), keandalan dari laporan yang telah diaudit (*reliability*), dan kegunaan laporan keuangan yang telah diaudit dalam pengambilan keputusan (*decision usefulness*).
5. Hasil penelitian Aristania (2011) yang berjudul Penginvestigasian terhadap *Expectation Gap* atas Hasil Laporan Audit pada Sektor Publik, yaitu terdapat perbedaan persepsi antara BPK dengan pengguna laporan keuangan daerah (DPRD dan BPKD) dilihat dari sisi pendapat wajar.

Perbedaan ini menunjukkan eksistensi *expectation gap* diantara pengguna laporan keuangan daerah, dan tidak terdapat perbedaan persepsi antara auditor BPK dengan pengguna laporan keuangan daerah yaitu anggota DPRD dan BPKD dilihat dari bukti audit, akuntabilitas, indenpendensi, materialitas, audit kinerja. Hal ini menunjukkan tidak adanya eksistensi *expectation gap* diantara pengguna laporan keuangan daerah.

2.6 Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat diketahui bahwa adanya perbedaan harapan/persepsi diantara pengguna laporan keuangan daerah dapat menunjukkan eksistensi *expectation gap*. Timbulnya *expectation gap* bermula dari adanya pertentangan kepentingan antara pemakai laporan keuangan, untuk mengatasi pertentangan tersebut maka pemakai laporan keuangan membutuhkan jasa auditor untuk memberi keyakinan atas keandalan pelaporan keuangan pemerintah, tapi tidak selamanya apa yang diharapkan pemakai laporan keuangan sama dengan hasil audit auditor atas laporan keuangan sehingga situasi tersebut bisa menimbulkan eksistensi *expectation gap*.

Ada beberapa faktor penyebab *expectation gap* berdasarkan penelitian terdahulu, yakni kualitas opini auditor, tanggung jawab auditor, indenpendensi auditor, kompetensi auditor, kinerja auditor, pelaporan audit, dan pelaksanaan audit. Agar dapat mencegah timbulnya *expectation gap* diantara pemakai laporan keuangan dengan auditor, diperlukan nilai informasi keandalan pelaporan keuangan atas hasil audit laporan keuangan. Sesuai uraian di atas maka dapat digambarkan dalam bentuk skema kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

2.7 Hipotesis Penelitian

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bertindak sebagai auditor eksternal melaksanakan audit atas laporan keuangan pemerintah, tentu harus memberikan pelaporan atas hasil auditnya kepada para pemakai laporan keuangan auditan. Para pengguna laporan keuangan auditan tersebut tentunya menginginkan pelaporan yang diberikan haruslah disampaikan dengan tepat waktu, tujuan yang jelas, berisikan masalah yang relevan, tersedia untuk umum, mudah dipahami, berisikan rekomendasi yang efektif, serta menjelaskan lingkup audit yang dilaksanakan.

Namun semua hal yang merupakan harapan dari pengguna laporan keuangan auditan tersebut tidak selamanya dapat terpenuhi atau sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Ketika pelaporan hasil audit yang disampaikan oleh pihak auditor (BPK) tidak sesuai dengan apa yang di khendaki oleh para

pemakai laporan keuangan auditan tersebut, sehingga timbullah perbedaan keinginan atau yang biasa disebut dengan *expectation gap*.

Teori yang dikemukakan humprey *et al.*, (1993) yang menyatakan bahwa ada empat dimensi untuk mengukur *expectation gap* salah satunya yaitu Keandalan dari laporan keuangan yang telah diaudit (*reliability*) sedangkan, penelitian terdahulu yang dilakukan Rusliyawati dan Halim (2008) bahwa terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara auditor BPK dan pengguna laporan keuangan daerah yang diwakili oleh anggota DPRD, pemda, dan masyarakat berkaitan dengan dimensi pelaporan. Hasil ini memberikan bukti bahwa terdapat *audit expectation gap* antara auditor BPK dan pengguna laporan keuangan daerah berkaitan dengan pelaporan hasil audit.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat hubungan positif antara keandalan pelaporan keuangan dengan *audit expectation gap*, dimana ketika pelaporan keuangan pemerintah daerah dapat diandalkan maka kemungkinan terjadinya *expectation gap* kecil dan juga sebaliknya, sehingga hubungan tersebut dihipotesiskan:

- Ho :Keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah tidak berpengaruh positif terhadap *audit expectation gap*
- Ha :keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap *audit expectation gap*.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Menurut Sekaran *and* Bougie (2009:152) rancangan penelitian, yang meliputi serangkaian pilihan pengambilan keputusan rasional yang mengenai tujuan studi, letaknya yaitu konteks studi, jenis yang sesuai untuk penelitian (jenis investigasi), tingkat manipulasi dan kontrol peneliti (tingkat intervensi peneliti), aspek temporal (horizon waktu), dan level analisis data (unit analisis).

Pada penelitian ini tujuan studi yaitu deskriptif dilakukan untuk mengetahui dan mampu untuk menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi. Tipe investigasi yang dilakukan adalah studi korelasi. Studi korelasi bertujuan untuk menemukan hubungan antara variabel-variabel terkait dengan minat penelitian.

Penelitian ini menggunakan *study setting noncontrived* yaitu, penelitian yang tidak melakukan perekrutan objek penelitiannya. Unit analisis penelitian ini berupa organisasi yaitu pemerintah daerah Kabupaten Enrekang. *Time horizon* penelitian ini menerapkan *cross-sectional* yaitu bentuk penelitian yang hanya melakukan kegiatan penelitian dengan sekali waktu saja dengan periode tertentu.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Inspektorat dan Kantor Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah pegawai pemerintahan yang berada di Kabupaten Enrekang, yaitu sebagai berikut.

1. Auditor, yaitu auditor internal (Kantor Inspektorat Kab. Enrekang).
2. Pegawai Kantor Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Enrekang.

Populasi pada penelitian ini yaitu auditor internal pemerintah bukan BPK karena penelitian ini hanya ingin mengetahui persepsi pemakai laporan keuangan mengenai seberapa besar pengaruh keandalan pelaporan keuangan terhadap *audit expectation gap*, jadi auditor dalam hal ini dikategorikan sebagai pemakai laporan keuangan. Sampel yang akan digunakan pada penelitian ini berjumlah enam puluh. Penelitian ini menggunakan *simple random sampling* yaitu pengambilan anggota dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dengan cara membagikan kuesioner langsung kepada auditor internal (Kantor Inspektorat), dan pegawai Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Kuesioner ini dibagi, dengan sekali penyebaran kepada responden.

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data secara tertulis yang berisi pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang harus dijawab secara tertulis pula. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala likert dengan lima skala yaitu: sangat setuju, setuju, cukup setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju (Sekaran dan Bowgie, 2009:152).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data diperoleh dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut.

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data serta mempelajari literatur-literatur yang ada berupa karya ilmiah, buku-buku atau kepustakaan lain yang berhubungan erat dengan masalah dalam penulisan ini.

2. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat mengenai gambaran umum perusahaan dan data-data yang relevan dengan objek penelitian yang dilakukan. Adapun alat digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Kuesioner

merupakan suatu lembar isian yang didalamnya berisi pernyataan-pernyataan yang harus dijawab oleh responden yang berhubungan penelitian.

b. Wawancara

merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung kepada para pejabat yang berwenang atau pada bagian yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti.

c. Pengamatan (Observasi)

merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung objek yang diteliti.

3.6 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional

Variabel adalah sesuatu yang dapat membedakan atau membawa variasi nilai yang bisa berbeda pada berbagai waktu untuk objek atau orang yang sama, atau pada waktu yang sama untuk objek atau orang yang berbeda sedangkan operasional adalah mereduksi konsep-konsep abstrak ke dalam konsep yang jelas cara pengukurannya (Sekaran and Bougie, 2009:127).

Pada penelitian ini memiliki dua variabel, yaitu sebagai berikut.

- a) Variabel dependen (Y), yaitu variabel yang menjadi fokus utama penulis dengan menguji pengaruhnya dengan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *audit expectation gap*. Dimana *expectation gap* adalah perbedaan antara apa yang masyarakat atau pengguna laporan keuangan percaya sebagai tanggung jawab akuntan dan auditor dan apa yang akuntan dan auditor percaya sebagai tanggung jawabnya.
- b) Variabel independen (X) yaitu variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah keandalan pelaporan keuangan. Mengidentifikasi apakah pelaporan yang disampaikan oleh auditor kepada para pengguna laporan auditan tersebut telah diberikan secara tepat waktu, disampaikan dengan tujuan yang jelas, berisikan masalah yang relevan, disajikan untuk umum, dan dibuat dalam format yang mudah dipahami.

3.7 Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2011:102) instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam ataupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena ini disebut variabel penelitian. Sesuai dengan judul yang diambil peneliti terdiri atas dua variabel independen dan satu variabel dependen. Jadi masing-masing instrumennya sebagai berikut:

Tabel 3.1 Instrumen Penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
1. kualitas Keandalan pelaporan keuangan (X)	1. Relevan	1. Memiliki umpan balik (<i>feedback value</i>) 2. Manfaat prediktif (peramalan) 3. Tepat waktu 4. lengkap	Ordinal
	2. Dapat diandalkan	1. Penyajian yang jujur 2. Dapat diverifikasi (<i>verifiability</i>) 3. Netralitas	Ordinal
	3. Dapat dibandingkan	1. konsisten penerapan kebijakan akuntansi 2. informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya	Ordinal
	4. Dapat dipahami	1. Bentuk informasi laporan keuangan disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna 2. Istilah informasi laporan keuangan disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna	Ordinal

Lanjutan Tabel 3.1

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
2. <i>Audit Expectation Gap</i> (Y)	1. kompetensi dan Independensi auditor	1. Auditor memberikan pendapat melalui bahasa lisan atau tertulis (<i>verbal or nonverbal skills</i>) 2. Auditor netral dan tidak bias 3. Auditor melakukan pemeriksaan menghindari konflik kepentingan	Ordinal
	2. Kinerja auditor	1. Auditor memahami tugas pokoknya 2. Auditor melaksanakan pemeriksaan dengan baik	Ordinal
	3. Peran auditor	1. sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku 2. semua kecurangan dapat dideteksi 3. semua tindakan penyimpangan telah dikonfirmasi	Ordinal

3.8 Analisis Data

3.8.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2011:147). Termasuk dalam statistik deskriptif yaitu dengan penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, mean (pengukuran tendensi sentral), perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, perhitungan persentase. Dalam

statistik deskriptif dapat dilakukan mencari kuatnya hubungan antara variable melalui analisis korelasi, melakukan prediksi dengan analisis regresi, dan membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata data sampel atau populasi. Tujuan utama dari penulisan ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

3.8.2 Uji Instrumen Pengumpulan Data

a. Uji Validitas

Uji validitas menjawab pertanyaan apakah instrumen penelitian yang telah disusun benar-benar akurat sehingga mampu mengukur apa yang seharusnya diukur (variable kunci yang sedang diteliti) (Supramono dan Utami, 2004:72). Pengukuran dinyatakan valid jika mengukur tujuannya dengan nyata atau benar. Pengujian validitas data dalam penelitian ini dengan bantuan program SPSS dengan metode *Bivariate Pearson* (produk momen pearson). Syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat valid adalah apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ pada taraf signifikan α 0,05. Jadi jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ instrumen dinyatakan valid. Korelasi yang digunakan adalah *Bivariate Pearson* (Produk Momen Pearson)

b. Uji Reliabilitas

Uji realibilitas data dilakukan untuk melihat konsistensi jawaban responden atas seluruh butir pertanyaan atau pernyataan yang digunakan untuk mengukur konsep tertentu (Supramono dan Utami, 2004:72). Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan cronbach alpha. Koefisien *cronbach alpha* yang lebih dari 0,60

menunjukkan keandalan (reliabilitas) instrument. Selain itu, *cronbach alpha* yang semakin mendekati 1 menunjukkan konsistensi reliabilitas internalnya.

3.8.3 Analisis Regresi Linear Sederhana

Untuk mengetahui Pengaruh keandalan Pelaporan Keuangan terhadap Audit *Expectation Gap*, hipotesis penelitian diuji dengan analisis regresi linear Sederhana. Langkah penghitungan analisisnya dengan menggunakan program SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*). Adapun persamaan umum dari analisis regresi linear berganda ini adalah:

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

Y = Variabel Dependen (*Expectation Gap*)

X = Variabel Independen (Keandalan Pelaporan Keuangan)

a = Konstanta

b = Koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen

3.8.4 Analisis Pengujian Hipotesis

Analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi mengenai Pengaruh Keandalan Pelaporan Keuangan terhadap Audit *Expectation Gap*. Untuk itu perlu dilakukan pengujian hipotesis, yaitu sebagai berikut.

a. Uji t

Dilakukan uji untuk mengetahui parsial variabel bebas terhadap variabel terikat. Untuk pengujian ini, dilakukan dengan melihat nilai t pada tabel

coefficients yang dihasilkan dengan bantuan SPSS. Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan sebaliknya jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternatif (H_a) ditolak, dan apabila nilai $t_{hitung} \geq t_{tabel}$, maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima.

b. Uji Koefisien Determinasi (KD)

Untuk menentukan besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen maka digunakan koefisien determinasi (KD) dengan rumus sebagai berikut.

$$Kd = (r_s)^2 \times 100\%$$

(Sugiyono, 2011: 151).

Keterangan : Kd = Koefisien determinasi

R_s = Koefisien korelasi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Data Umum Inspektorat Kab. Enrekang

1. Kedudukan Organisasi

Sebagai implementasi Otonomi Daerah dan kebutuhan pembangunan maka Pengawasan dalam organisasi pemerintah diperlukan agar organisasi pemerintahan dapat bekerja secara efisien, efektif, dan ekonomis. Pengawasan ini merupakan salah satu unsur penting dalam rangka meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan urusan umum pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Inspektorat Kab. Enrekang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Enrekang Nomor 8 Tahun 2008 tentang pembentukan, susunan organisasi dan kata kerja Inspektorat Kab. Enrekang yang merupakan penyesuaian dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Inspektorat Kabupaten Enrekang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Enrekang dalam pelaksanaan tugasnya dan secara administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

2. Tugas pokok dan fungsi

Inspektorat Kabupaten Enrekang adalah salah satu SKPD perangkat Otonomi Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kab. Enrekang, yang diuraikan sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Inspektorat Kab. Enrekang mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Inspektorat Kab. Enrekang mempunyai fungsi:

1. Perencanaan program pengawasan
2. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penelitian tugas pengawasan

3. Pernyataan Visi dan Misi Inspektorat Kab. Enrekang

Visi Inspektorat Kab. Enrekang ditetapkan dengan mengacu pada Visi Pemerintah Kabupaten Enrekang yaitu "***Terwujudnya Kabupaten Enrekang sebagai Daerah Agropolitan yang lebih maju, unggul, sejahtera dan religius pada Tahun 2013***". Yang memuat makna Kabupaten Enrekang menjadikan warganya sebagai masyarakat yang mampu mengelola sumber daya sendiri untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan agropolitan untuk mencapai masyarakat

yang lebih maju, unggul, sejahtera dan religius. Dimana untuk mencapai visi tersebut bila dilihat dari kaca mata Pengawasan mengisyaratkan perlunya Sumber Daya Manusia yang berkualitas (Pendidikan formal, fisik, mental, sosial dan produktif). Sumber daya disini terdiri dari aparat pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat.

Untuk mencapai visi tersebut Inspektorat Kab.Enrekang merumuskan beberapa misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas SDM pengawasan yang profesional didukung sarana dan prasarana yang memadai.
- b. Terjaminnya kemungkinan tindakan pencegahan dan koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan.
- c. Menumbuhkan motivasi perbaikan, pengurangan dan atau peniadaan penyimpangan.

4. Struktur Organisasi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Inspektorat Kab. Enrekang mempunyai struktur organisasi sebagai berikut.

1. Kepala Inspektorat (Inspektur);
2. Sekretaris;
 - a. Sub. Bagian Perencanaan;
 - b. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub. Bagian Keuangan;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
4. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan dan Keuangan;
5. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan dan Kemasyarakatan ;

6. Inspektur Pembantu Bidang Pengaduan Masyarakat dan Penyelesaian Tindak Lanjut.

4.1.2 Data Umum Kantor Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

1. Struktur Organisasi

Untuk lebih mengefektifkan kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 yang dijabarkan kedalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 dibentuklah organisasi DPKAD dan tata Kerja DPKAD Kabupaten Enrekang.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPKAD sebagaimana yang telah dijelaskan, DPKAD Kabupaten Enrekang memiliki aparatur sampai dengan saat ini berjumlah 42 orang pegawai yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas,
2. Sekretaris,
 - a. Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegaiwaan,
 - b. Kepala Sub. Bagian Perencanaan,
 - c. Kepala Sub. Bagian Keuangan.
3. Kepala bidang Penerimaan
 - a. Kepala Seksi Pajak dan Retribusi,
 - b. Kepala Seksi Dana Perimbangan,
 - c. Kepala Seksi Pelaporan.
4. Kepala Bidang Akuntansi dan Verifikasi
 - a. Kepala Seksi akuntansi,
 - b. Kepala Seksi Verifikasi,
 - c. Kepala Seksi Pelaporan.

5. Kepala Bidang Pengeluaran
 - a. Kepala Seksi Anggaran,
 - b. Kepala Seksi Perbendaharaan,
 - c. Kepala Seksi Pelaporan.
6. Kepala Bidang Asset
 - a. Kepala Seksi Inventarisasi,
 - b. Kepala seksi Persertifikatan Asset,
 - c. Kepala Seksi Neraca asset.

2. Visi dan Misi

Untuk mengantisipasi tantangan dan perkembangan kedepan, Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang yang merupakan salah satu lembaga Pemerintah daerah Kabupaten Enrekang perlu terus-menerus mengembangkan peluang dan melakukan perubahan kearah perbaikan seiring dengan meningkatnya persaingan, tantangan dan tujuan masyarakat akan pelayanan prima sehingga mendorong lembaga ini untuk senantiasa mempersiapkan diri agar tetap eksis dalam proses pembangunan, perubahan tersebut perlu dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

Visi yang merupakan cara pandang kedepan tentang kemana Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang akan diarahkan dan apa yang akan dicapai. Adapun Visi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang adalah

” Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang efisien, efektif, akuntabel, dan transparan ”

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh Pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran Badan pengelola Keuangan daerah Kabupaten Enrekang dalam penyelenggaraan otonomi daerah Kabupaten Enrekang secara khusus dan penyelenggaraan Negara secara Umum. Misi sesuai dengan tugas pokok dengan memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan dan memberikan peluang untuk perubahan sesuai perkembangan lingkungan stratejik yang dihadapi, oleh karena itu Misi Badan pengelola Keuangan daerah Kabupaten Enrekang yaitu.

” Mengoptimalkan pendapatan dan meningkatkan pengendalian pengelolaan keuangan daerah yang didukung oleh penatausahaan yang tertib serta meningkatkan kerja sama dengan pihak terkait demi kelancaran peneyelenggaraan otonomi daerah”.

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

4.2.1 Jenis Kelamin

Tabel 4.2 Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persen (%)
Laki-laki	34	56.67
Perempuan	26	43.33
Total	60	100

Sumber :Pengolahan Data Primer 2013

Dilihat dari jenis kelamin, maka dapat diketahui bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki (56.67%), sisanya 43.33% berjenis kelamin perempuan.

4.2.2 Pendidikan Terakhir

Tabel 4.3 Pendidikan Terakhir Responden

Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persen (%)
S1	51	85.0
S2	9	15.0
Total	60	100

Sumber : Pengolahan Data Primer 2013

Berdasarkan tingkat pendidikannya dapat diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan terakhir S1 (85%), sedangkan 15% berpendidikan S2.

4.2.3 Usia

Tabel 4.4 Usia Responden

Usia	Frekuensi	Persen (%)
30 – 45	22	36.67
46 – 60	38	63.33
Total	60	100

Sumber : Pengolahan Data Primer 2013

Dilihat dari usianya, sebagian besar responden berusia antara 46 hingga 60 tahun (63.33%), dan sisanya yaitu 36.67% berusia antara 30 hingga 45 tahun.

4.2.4 Lama Bekerja

Tabel 4.5 Lama Bekerja Responden

Lama Bekerja	Frekuensi	Persen (%)
1 – 15	32	53.33
16 – 30	28	46.67
Total	60	100

Sumber : Pengolahan Data Primer 2013

Berdasarkan dari tabel diatas, menunjukkan jumlah responden yang paling lama bekerja antara 16 hingga 30 tahun yaitu sebanyak 53.33%, sedangkan lama bekerja 1-15 tahun sebanyak 46.67% responden.

4.2.5 Penyebaran dan Penerimaan Kuesioner

Dalam proses penyebaran kuesioner, kantor pemerintah yang dijadikan objek penelitian ini, menerima kuesioner yang disebar. Adapun jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 60 kuesioner dengan jumlah sama pada tiap kantor. Berikut daftar penyebaran kuesioner pada tiap kantor

Table 4.6 Daftar Penyebaran Kuesioner pada Setiap Kantor Pemerintah

No.	Nama Kantor Pemerintah	Jumlah Kuesioner	%
1	Kantor inspektorat Kabupaten Enrekang	30	50
2	Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Enrekang	30	50
Jumlah		60	100

Sumber: Pengolahan Data Primer 2013

4.3 Pembahasan

4.3.1 Deskripsi Variabel Penelitian

1. Keandalan Pelaporan Keuangan (X)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat dilihat jawaban kuesioner atas pertanyaan mengenai keandalan pelaporan keuangan yang telah dikemukakan oleh 60 responden yang berasal dari kantor inspektorat dan kantor keuangan adalah sebagai berikut.

Tabel 4.7 Tanggapan Responden terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan (X)

No.	Pertanyaan	Kategori Jawaban					Jum.	Rata-Rata
		SS	S	CS	TS	STS		
1	Laporan pemeriksaan auditor diberikan tepat waktu	23	37	0	0	0	263	4,38
2	Laporan pemeriksaan auditor disampaikan dengan tujuan yang jelas	24	35	1	0	0	263	4,38
3	Laporan pemeriksaan auditor berisi masalah yang relevan	24	35	1	0	0	263	4,38
4	Laporan pemeriksaan auditor tersedia untuk umum (publik)	26	16	8	7	3	231	3,85
5	Laporan pemeriksaan auditor dalam format mudah dipahami	30	16	0	0	0	270	4,5
6	Laporan pemeriksaan auditor menjelaskan ruang lingkup audit yang dilakukan	24	35	1	0	0	263	4,38
7	Laporan pemeriksaan auditor memerhatikan kebutuhan pengguna laporan keuangan	28	30	2	0	0	266	4,43
8	Laporan pemeriksaan auditor mekanisme efektif untuk menjamin akuntabilitas publik	26	30	2	0	0	266	4,43

Sumber: Pengolahan Data Primer 2013

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan mengenai jawaban responden tentang variabel keandalan pelaporan keuangan secara keseluruhan adalah sebagai berikut.

- a) Untuk pertanyaan pertama rata-rata jawaban responden adalah 4,38 yang berarti bahwa responden setuju jika auditor menyampaikan laporan hasil pemeriksaan tepat waktu.

- b) Untuk pertanyaan kedua rata-rata jawaban responden adalah 4,38 yang berarti bahwa responden setuju jika auditor menyampaikan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan yang jelas.
- c) Untuk pertanyaan ketiga rata-rata jawaban responden adalah 4,38 yang berarti bahwa responden setuju jika hasil pemeriksaan auditor berisi masalah yang relevan.
- d) Untuk pertanyaan keempat rata-rata jawaban responden adalah 3,85 yang berarti bahwa responden cukup setuju jika laporan hasil pemeriksaan tersedia untuk umum (publik).
- e) Untuk pertanyaan kelima rata-rata jawaban responden adalah 4,5 yang berarti bahwa responden setuju jika Laporan pemeriksaan auditor dalam format mudah dipahami.
- f) Untuk pertanyaan keenam rata-rata jawaban responden adalah 4,38 yang berarti bahwa responden setuju jika Laporan pemeriksaan auditor menjelaskan ruang lingkup audit yang dilakukan.
- g) Untuk pertanyaan ketujuh rata-rata jawaban responden adalah 4,43 yang berarti bahwa responden setuju jika Laporan pemeriksaan auditor memerhatikan kebutuhan pengguna laporan keuangan.
- h) Untuk pertanyaan pertama rata-rata jawaban responden adalah 4,43 yang berarti bahwa responden setuju jika Laporan pemeriksaan auditor mekanisme efektif untuk menjamin akuntabilitas publik.

2. *Audit Expectation Gap (Y)*

Berikut adalah jawaban kuesioner atas pertanyaan mengenai audit expectation gap yang telah dikemukakan oleh 60 responden yang berasal dari kantor inspektorat dan kantor keuangan adalah sebagai berikut.

Tabel 4.8 Tanggapan Responden terhadap *Audit Expectatio Gap* (Y)

No.	Pertanyaan	Kategori Jawaban					Jum.	Rata-Rata
		SS	S	CS	TS	STS		
1	Auditor dalam melakukan pemeriksaan telah memahami tugas pokoknya	34	25	1	0	0	273	4,55
2	Laporan hasil pemeriksaan auditor sesuai dengan standar yang berlaku	39	21	0	0	0	279	4,65
3	Semua kecurangan dapat dideteksi auditor	29	30	1	0	0	268	4,47
4	Penyimpangan yang dideteksi auditor telah dikonfirmasi kepada lembaga yang berwenang	21	27	11	1	0	248	4,13
5	Auditor telah melaksanakan tugas pemeriksaan dengan baik	29	31	0	0	0	273	4,55
6	Opini yang diberikan auditor atas laporan keuangan pemerintah daerah wajar dengan pengecualian (<i>qualified opinion</i>)	2	47	11	0	0	231	3,85
7	Auditor pemerintah dalam melakukan pemeriksaan selalu netral dan tidak bias	26	32	2	0	0	264	4,4
8	Auditor dalam melakukan pemeriksaan menghindari konflik kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil audit	26	33	1	0	0	265	4,42

Sumber: Pengolahan Data Primer 2013

- a) Untuk pertanyaan pertama rata-rata jawaban responden adalah 4,55 yang berarti bahwa responden setuju jika Auditor dalam melakukan pemeriksaan telah memahami tugas pokoknya.

- b) Untuk pertanyaan kedua rata-rata jawaban responden adalah 4,65 yang berarti bahwa responden setuju jika Laporan hasil pemeriksaan auditor sesuai dengan standar yang berlaku
- c) Untuk pertanyaan ketiga rata-rata jawaban responden adalah 4,47 yang berarti bahwa responden setuju jika Semua kecurangan dapat dideteksi auditor.
- d) Untuk pertanyaan keempat rata-rata jawaban responden adalah 4,13 yang berarti bahwa responden setuju jika Penyimpangan yang dideteksi auditor telah dikonfirmasi kepada lembaga yang berwenang.
- e) Untuk pertanyaan kelima rata-rata jawaban responden adalah 4,55 yang berarti bahwa responden setuju jika Auditor telah melaksanakan tugas pemeriksaan dengan baik.
- f) Untuk pertanyaan keenam rata-rata jawaban responden adalah 3,85 yang berarti bahwa responden cukup setuju jika Opini yang diberikan auditor atas laporan keuangan pemerintah daerah wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*).
- g) Untuk pertanyaan ketujuh rata-rata jawaban responden adalah 4,4 yang berarti bahwa responden setuju jika Auditor pemerintah dalam melakukan pemeriksaan selalu netral dan tidak bias.
- h) Untuk pertanyaan pertama rata-rata jawaban responden adalah 4,42 yang berarti bahwa responden setuju jika Auditor dalam melakukan pemeriksaan menghindari konflik kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil audit.

4.3.2 Uji Validitas

Untuk menentukan apakah suatu item layak digunakan atau tidak adalah dengan mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total. Skor total item adalah jumlah keseluruhan item. Setiap pertanyaan dikatakan valid apabila r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} . Dari hasil uji validitas item yang dilakukan dengan menggunakan program statistik SPSS 20. Didapat hasil *corrected item total correlation* untuk variabel-variabel yang dipergunakan dalam penelitian ini ditampilkan pada tabel 4.8 dan tabel 4.9 sebagai berikut.

Table 4.9 Hasil Uji Validitas Variabel X Keandalan Pelaporan Keuangan

Item Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Hasil
1	0.522	0.254	Valid
2	0.502	0.254	Valid
3	0.589	0.254	Valid
4	0.801	0.254	Valid
5	0.688	0.254	Valid
6	0.492	0.254	Valid
7	0.878	0.254	Valid
8	0.645	0.254	Valid
Total	1	0.254	Valid

Sumber : Output SPSS 20.0, 2013

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS pada table 4.8 diatas menunjukkan hasil yang baik. Nilai korelasi untuk variabel dibandingkan dengan nilai r_{tabel} pada $n = 60$ dan taraf signifikansi 0,05. Berdasarkan hal ini, maka r_{tabel} adalah 0,254. Berdasarkan hasil uji validitas, dapat diketahui bahwa item pertanyaan dalam variabel keandalan pelaporan keuangan (x) valid, karena nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} .

Table 4.10 Hasil Uji Validitas Variabel Y *Audit Expectation Gap*

Item Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Hasil
1	0.887	0.254	Valid
2	0.849	0.254	Valid
3	0.608	0.254	Valid
4	0.689	0.254	Valid
5	0.678	0.254	Valid
6	0.692	0.254	Valid
7	0.834	0.254	Valid
8	0.727	0.254	Valid
9	0.604	0.254	Valid
Total	1	0.254	Valid

Sumber : Output SPSS 20.0, 2013

Berdasarkan Tabel 4.9 nampak bahwa nilai r_{hitung} pada semua item pertanyaan variabel *audit expectation gap* (Y) menunjukkan angka yang lebih besar dari r_{tabel} (2,54), sehingga dapat dinyatakan bahwa semua item pertanyaan Y tersebut valid dan dapat dipergunakan dalam penelitian.

4.3.3 Uji Reabilitas

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dipercaya atau dapat diandalkan. Pengujian ini dilakukan dengan menghitung koefisien *cronbach's alpha* dari masing – masing instrumen dalam suatu variabel. Instrumen dapat dikatakan reliabel apabila memiliki nilai *cronbach's alpha* lebih dari 0,60. Penentuan reabilitas suatu penelitian adalah:

1. Jika *cronbach's alpha* < 0,6 maka reabiliti dikatakan buruk
2. Jika *cronbach's alpha* 0,6 – 0,77 maka reabiliti dikatakan cukup
3. jika *cronbach's alpha* > 0,8 maka reabiliti dikatakan baik

Berikut adalah hasil uji reliabilitas atas variabel-variabel penelitian yang diolah dengan menggunakan SPSS Statistics 20 yang ditampilkan pada tabel 4.10 dan tabel 4.11 sebagai berikut:

Tabel 4.11 Hasil Uji Reliabilitas
Variabel X

Reliability Statistics	
<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Items</i>
.753	9

Sumber : Output SPSS 20.0, 2013

Berdasarkan hasil uji realibilitas untuk variabel X menunjukkan bahwa variable Keandalan Pelaporan Keuangan (X) memiliki nilai *Cronbachs's Alpha* lebih besar dari 0,60 yakni 0,753. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat reabilitas semua item pertanyaan dari variable X baik.

Tabel 4.12 Hasil Uji Reliabilitas
Variabel Y

Reliability Statistics	
<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Items</i>
.778	9

Sumber : Output SPSS 20.0, 2013

Berdasarkan hasil uji realibilitas untuk variabel Y menunjukkan bahwa variabel *Audit Expectation Gap* (Y) memiliki nilai *Cronbachs's Alpha* lebih besar dari 0,60 yakni 0,778. Dengan demikian, tingkat reabilitas semua item pertanyaan dari variabel Y baik.

4.4 Pengujian Hipotesis

4.4.1 Analisis Regresi Linear Sederhana

Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji regresi linear sederhana. Uji regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui ada

tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat dihitung melalui suatu persamaan.

Tabel 4.13 Uji Regresi Linear Sederhana
Coefficients^a

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>T</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1 (Constant)	14.550	2.353		6.183	.000
Totalx	.577	.067	.748	8.585	.000

a. Dependent Variable: totally

Sumber : Output SPSS 20.0, 2013

Dari tabel diatas dapat diperoleh rumus regresi sebagai berikut :

$$Y = 14.550 + 0.577X$$

Penjelsan persamaan tersebut diatas sebagai berikut:

1. Dalam persamaan regresi diatas, konstanta (β_0) adalah sebesar 14.550 hal ini berarti jika variabel Keandalan Pelaporan Keuangan (X) nilainya 0, maka *Audit Expectation Gap* (Y) nilainya sebesar 14.550.
2. Koefisien regresi variabel keandalan pelaporan keuangan (X) sebesar 0,577, hal ini mengandung arti, bahwa setiap keandalan pelaporan keuangan (X) mengalami kenaikan satu satuan, maka *Audit Expectation Gap* (Y) naik sebesar 0,577.

4.4.2 Uji t

Uji t (uji koefisien regresi sederhana) digunakan untuk mengetahui apakah berpengaruh signifikan terhadap variable dependen.

1. H_0 : keandalan pelaporan keuangan tidak berpengaruh positif terhadap *audit expectation gap*

2. H_a : keandalan pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap *audit expectation gap*

Bila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak

Bila $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima

Berdasarkan table distribusi t dicari pada $\alpha = 5\% : 2 = 2,5\%$ (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan (df) $n-2$ atau $16-2 = 14$ (n adalah jumlah data). Dengan pengujian 2 sisi (signifikansi = 0,025) hasil diperoleh untuk t tabel sebesar $+2.120/-2.120$ (lihat pada lampiran).

Tabel 4.14 Uji t

<i>Model</i>		Coefficients ^a			<i>T</i>	<i>Sig.</i>
		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>		
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1	(Constant)	14.550	2.353		6.183	.000
	Totalx	.577	.067	.748	8.585	.000

a. Dependent Variable: totally

Sumber : Output SPSS 20.0, 2013

Berdasarkan hasil output dengan menggunakan program spss 20.0, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($8.585 > 2.120$) dan signifikansi ($0,000 < 0,05$) maka, H_0 ditolak, artinya keandalan pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap *audit expectation gap*, karena t_{hitung} nilainya positif, berarti pengaruh yang terjadi adalah positif, atau dapat diartikan semakin tingginya tingkat kendalan pelaporan keuangan, maka terjadinya *expectation gap* berkurang. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipoesis yang menyatakan keandalan pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap *audit expectation gap*, terbukti.

4.4.3 Uji Determinasi

Analisis koefisien determinasi dilakukan untuk melihat seberapa besar presentase pengaruh keandalan pelaporan keuangan terhadap *audit expectation gap*.

Tabel 4.15 Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary

Mode I	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.748 ^a	.560	.552	1.679

a. Predictors: (Constant), totalx

Sumber : Output SPSS 20.0, 2013

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa nilai *R square* yang diperoleh sebesar 0,560 (56%) yang menunjukkan *Audit Expectation Gap* (Y) dipengaruhi oleh variabel Keandalan Pelaporan Keuangan (X) sebesar 56%, dan sisanya 44% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini. Dengan melihat nilai koefisien yang tinggi menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen juga tinggi yaitu sebesar 56%, sehingga variabel independen yang digunakan pada penelitian ini sangat berpengaruh terhadap *expectation gap*.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis maka penulis menulis kesimpulan, sebagai berikut.

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keandalan pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap *audit expectation gap* yang dapat diartikan bahwa, ketika tingkat kendalan pelaporan keuangan tinggi maka kemungkinan terjadinya *expectation gap* kecil, sedangkan ketika tingkat keandalan pelaporan keuangan rendah maka kemungkinan terjadinya *expectation gap* besar.
2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keandalan pelaporan keuangan memberikan pengaruh signifikan terhadap *audit expectation gap* sebesar 56% dan sisanya sebesar 44% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

5.2 Keterbatasan

Sebagai sebuah penelitian *survey method*, penelitian ini juga mempunyai keterbatasan. Keterbatasan ini antara lain:

- a) Keakuratan jawaban pengisian kuesioner, karena penelitian ini menggunakan *survey method*, maka peneliti tidak biasa mengontrol jawaban responden. Mungkin saja responden tidak menjawab sejujurnya pertanyaan dalam kuesioner, atau mungkin saja orang

mengisi kuesioner tersebut bukan merupakan sampel yang diinginkan peneliti.

- b) Latar belakang responden dengan kualifikasi non akuntansi, akan dapat memberikan pengurangan pemahaman tentang pertanyaan kuesioner.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang penulis dapat berikan adalah:

- a. Perluasan jumlah sampel pada propinsi-propinsi lainnya, agar hasil pengujian yang diperoleh dapat digeneralisir untuk seluruh Indonesia.
- b. Memperpanjang waktu penelitian agar hasil pengujian dapat lebih terlihat dengan baik.
- c. Perlu disosialisasikan pentingnya transparansi laporan keuangan daerah kepada masyarakat sebagai salah satu cara agar masyarakat mengerti cara membaca laporan keuangan daerah auditan sehingga tidak terjadi perbedaan persepsi. Hal ini bisa dilakukan melalui media elektronik atau media cetak.
- d. Pemerintah juga perlu meningkatkan sumber daya manusia di pemda yaitu dengan menyekolahkan stafnya ke jenjang pendidikan tertentu, atau dengan melakukan pelatihan-pelatihan audit ke pegawai-pegawai pemda.

DAFTAR PUSTAKA

- Andhikara, A. 2010. *Ekspektasi Auditor, Investor, dan Akuntan Manajemen terhadap Pemeriksaan Keuangan*. Jurnal Akuntansi dan Manajemen. (Online), Vol. 23, No. 1, April 2012: 1-78 Terakreditasi SK. Nomor: 64/Dikti/kep/2010 ISSN: 0853-1259.
- Arens and Loebbecke. 1996. *Auditig*. Jakarta. Salemba Empat..
- Aristania, V. 2011. *Penginvestigasian Terhadap Expectation Gap Hasil Laporan Keuangan Audit pada Sektor Publik*. Jakarta.
- Bastian, I. 2003. *Audit Sektor Publik*. Jakarta: Visi Global Media.
- _____. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: suatu pengantar*. Yogyakarta: Erlangga.
- Boyton, W. Johnson, R. dan Kell, W. 2001. *Modern Auditing*. Jakarta: Erlangga.
- Djamil, N. 2007. *Persepsi Auditor dan Pemakai Jasa General Audit yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta tentang Tanggung Jawab Auditor, Keandalan, dan Kegunaan Laporan Keuangan Auditan*.
- Gamaliel, H. *Analisa Persepsi Mahasiswa terhadap Hasil Audit dan Laporan Keuangan Auditan dalam Kaitannya dengan Tanggung Jawab, Keandalan dan Kegunaan untuk Menilai Kinerja Perusahaan Masa Depan*. Jurnal Organisasi dan Manajemen. (Online), Volume 3, Nomor 2, September 2007, 104-115.
- Harahap, S. 2002. *Teori Akuntansi: Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Hutabarat, J. dan Yuyeta, E. 2013. *Kesenjangan Harapan Audit Berdasarkan Persepsi Auditor Inspektorat dan Pemakai Laporan (Studi pada pemerintah kota Denpasar, Pemerintah kabupaten Gianyar)*. Diponegoro Journal of Accounting. (Online), volume 1, Nomor 1, tahun 2013, Hal 1, (<http://ejournal.Undip.ac.id/index.php/accounting>)

- Jumingan. 2006. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta. PT Bumi Aksara.
- Kartika, A. 2009. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay Indonesia (studi empiris pada Perusahaan-Perusahaan LQ 45 yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta)*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), (Online), VOL 16, NO1, Maret 2009, Hal 1-17 ISSN: 14123126.
- Kho, H. 2010. *Analisis Persepsi antara Auditor, Mahasiswa, dan Pemakai Laporan Keuangan Terhadap Peran dan Tanggung Jawab Auditor*. Padang. Program Strata 1 Fakultas Ekonomi Universitas Andalas
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Messier, Glover, and Prawitt. 2006. *Auditing and Assurance Services*. Jakarta. Salemba Empat.
- Mulyadi, dan Kanaka, P. 1998. *Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.
- Murwanto, R, Budiarto, A, dan Rahmdhana, F. 2005. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar bagi Pembangunan Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan RI.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Jakarta, 2010. Salemba Empat.
- Priyanto, D. 2013. *Mandiri Belajar Analisis Data dengan SPSS*. Jogjakarta: Mediakon
- Ramdhani, D. 2012. *Persepsi Pemakai Laporan Keuangan dan Auditor Mengenai Expectation Gap: Studi Kasus di Kota Semarang*. Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Rayu, D. 2011. *Expectation Gap antara Pemakai Laporan Keuangan Pemerintah dan Auditor Pemerintah: Studi Kasus di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah*. Semarang.
- Rusliyawati, dan Halim, A. 2008. *Penginvestigasian Audit Expectation Gap pada Sektor Publik, symposium nasional akuntansi*. Pontianak.

- Said, D. dkk. 2012. *Pedoman Penulisan Skripsi Edisi 1*. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Sekaran, U. and Bougie, R. 2009. *Research Methods for Business 5th Edition*. UnitedKingdom: John Wiley and Sons Ltd.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*. Bandung. Alfabeta, CV.
- Suryabarata. S. 20011. *Metedeologi Penelitian*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Supramono dan Utami. I. 2004. *Desain Proposal Penelitian: Akuntansi dan Keuangan*. Yogyakarta. ANDI Yogyakarta.
- Wedari. L dan Indarto. S. 2007. *Expectation Gap antara Auditor Pengguna Laporan Keuangan Auditan terhadap Tugas dan Tanggung Jawab Auditor*. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Akuntansi. Semarang.
- Winarna, J. dan Suparno, Y. 2003. *Peran Pengajaran Auditing terhadap Pengurangan Expectation Gap*. (Online), Jurnal Bisnis dan Manajemen VOL. 3, NO. 1, 2003: 36-48. Surakarta.
- Yulianthi, A. 2013. *Expectation Gap antara Auditor Pemerintah dan Pemakai Laporan Keuangan Pemerintah dilihat dari Latar Belakang Pendidikan dan Wilayah Bekerja terhadap Laporan Keuangan Auditan Pemerintah di Provinsi Bali*. (Online), Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan. Vol 9. No. 2 Juli 2013.
- Yuliati. R, Winarna. J, dan Setiawan. S. 2007. *Expectation Gap antara Pemakai Laporan Keuangan Pemerintah dan Auditor Pemerintah*. Symposium Nasioanl Akuntansi X, Makassar.

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

Kepada Yth.
Bapak/Ibu
di Tempat

Hal : Permohonan untuk menjadi Responden

Dengan hormat,

Dalam rangka menyelesaikan skripsi pada program Sarjana Akuntansi Universitas Hasanuddin Makassar, maka peneliti mempunyai kewajiban untuk melakukan penelitian. Sehubungan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan dalam rangka penulisan skripsi, maka peneliti memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi responden penelitian dengan mengisi kuesioner dan memilih jawaban pada kolom yang telah disediakan.

Jawaban dari kuesioner ini akan peneliti gunakan sebagai keperluan untuk menyusun skripsi yang berjudul, "**Pengaruh Keandalan Pelaporan keuangan terhadap *Audit Expectation Gap***", maka untuk itu pengisian kuesioner ini mohon diisi seobjektif mungkin.

Sebagaimana penelitian ilmiah, kerahasiaan identitas Bapak/Ibu dalam memberikan penilaian dijamin tidak akan membawa konsekuensi yang merugikan dan sebelum mengembalikan kuesioner ini, Bapak/Ibu dimohon dapat memeriksa kembali semua jawaban dalam tiap bagian, peneliti berharap tidak ada butir/pertanyaan yang terlewat atau tidak terjawab.

Atas kesediaannya dalam mengisi kuesioner ini, diucapkan banyak terima kasih.

Makassar, 2013

Yang membuat pernyataan,

Fatriansyah

KUESIONER

Sehubungan hal tersebut peneliti ingin mengetahui pengaruh keandalan pelaporan keuangan terhadap *audit expectation gap* dengan menggunakan variabel keandalan pelaporan dan *epectation gap*.

A. Identitas Responden

Pilih jawaban yang sesuai dengan cara memberikan tanda silang (X) atau menuliskan jawaban pada kotak yang tersedia.

1. Jenis Kelamin : Laki-Laki Perempuan
2. Pendidikan Terakhir : _____.
3. Usia : _____ tahun.
4. Masa Kerja : _____ tahun.

B. Petunjuk Pengisian Kuesioner

Berilah tanda silang (X) pada kolom jawaban yang telah disediakan sesuai dengan pendapat atau yang mewakili perasaan Bapak/Ibu.

Keterangan:

- 5 = Sangat Setuju
- 4 = Setuju
- 3 = Cukup Setuju
- 2 = Tidak Setuju
- 1 = Sangat Tidak Setuju

1. Keandalan Pelaporan Keuangan

- a. Berdasarkan pengalaman Bapak/Ibu, laporan hasil pemeriksaan auditor pemerintah diberikan tepat waktu.

ST	S	CS	TS	STS
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	4	3	2	1

- b. Berdasarkan pengalaman Bapak/Ibu, laporan hasil pemeriksaan auditor pemerintah disampaikan dengan tujuan yang jelas.

ST	S	CS	TS	STS
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	4	3	2	1

- c. Berdasarkan pengalaman Bapak/Ibu, laporan hasil pemeriksaan auditor pemerintah berisi masalah yang relevan.

ST	S	CS	TS	STS
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	4	3	2	1

- d. Berdasarkan pengalaman Bapak/Ibu, laporan hasil pemeriksaan auditor pemerintah tersedia untuk umum (publik).

ST	S	CS	TS	STS
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	4	3	2	1

- e. Berdasarkan pengalaman Bapak/Ibu, laporan hasil pemeriksaan auditor pemerintah disajikan dalam format yang mudah dipahami.

ST	S	CS	TS	STS
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	4	3	2	1

- f. Berdasarkan pengalaman Bapak/Ibu, laporan hasil pemeriksaan auditor pemerintah menjelaskan luas pekerjaan (lingkup audit yang dilaksanakan).

ST	S	CS	TS	STS
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	4	3	2	1

- g. Berdasarkan pengalaman Bapak/Ibu, laporan hasil pemeriksaan auditor pemerintah memerhatikan kebutuhan pengguna informasi laporan keuangan.

ST	S	CS	TS	STS
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	4	3	2	1

- h. Berdasarkan pengalaman Bapak/Ibu, laporan hasil pemeriksaan auditor pemerintah merupakan mekanisme efektif untuk menjamin akuntabilitas publik.

ST	S	CS	TS	STS
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	4	3	2	1

2. *Expectation Gap*

- a. Berdasarkan pengalaman Bapak/Ibu, auditor pemerintah dalam melakukan pemeriksaan telah memahami tugas pokoknya.

ST	S	CS	TS	STS
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	4	3	2	1

- b. Berdasarkan pengalaman Bapak/Ibu, laporan hasil pemeriksaan auditor pemerintah sesuai dengan aturan-aturan/standar yang berlaku.

ST	S	CS	TS	STS
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	4	3	2	1

- c. Berdasarkan pengalaman Bapak/Ibu, semua kecurangan yang material dapat dideteksi oleh auditor pemerintah.

ST	S	CS	TS	STS
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	4	3	2	1

- d. Berdasarkan pengalaman Bapak/Ibu, semua tindakan penyimpangan yang dideteksi auditor pemerintah telah dikonfirmasi secara signifikan (cukup berarti) kepada lembaga yang berwenang.

ST	S	CS	TS	STS
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	4	3	2	1

- e. Berdasarkan pengalaman Bapak/Ibu, auditor pemerintah telah melaksanakan tugas pemeriksaan dengan baik.

ST	S	CS	TS	STS
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	4	3	2	1

- f. Berdasarkan pemeriksaan auditor, opini yang diberikan atas laporan keuangan pemerintah daerah wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*).

ST	S	CS	TS	STS
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	4	3	2	1

- g. Berdasarkan pengalaman Bapak/Ibu, auditor pemerintah dalam melakukan pemeriksaan selalu netral dan tidak bias.

ST	S	CS	TS	STS
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	4	3	2	1

- h. Berdasarkan pengalaman Bapak/Ibu, auditor pemerintah dalam melakukan pemeriksaan menghindari konflik kepentingan dalam hal merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil audit.

ST	S	CS	TS	STS
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	4	3	2	1

Lampiran 2 Data Output SPSS 20

Uji Validitas

		Correlations								
		x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	Totalx
x1	Pearson Correlation	1	.073	.356**	.262*	.289*	.197	.461**	.235	.522**
	Sig. (2-tailed)		.579	.005	.043	.025	.132	.000	.070	.000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60
x2	Pearson Correlation	.073	1	.110	.368**	.353**	.073	.347**	.300*	.502**
	Sig. (2-tailed)	.579		.401	.004	.006	.579	.007	.020	.000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60
x3	Pearson Correlation	.356**	.110	1	.236	.510**	.295*	.491**	.333**	.589**
	Sig. (2-tailed)	.005	.401		.069	.000	.022	.000	.009	.000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60
x4	Pearson Correlation	.262*	.368**	.236	1	.453**	.262*	.642**	.393**	.801**
	Sig. (2-tailed)	.043	.004	.069		.000	.043	.000	.002	.000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60
x5	Pearson Correlation	.289*	.353**	.510**	.453**	1	.160	.537**	.369**	.688**
	Sig. (2-tailed)	.025	.006	.000	.000		.221	.000	.004	.000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60
x6	Pearson Correlation	.197	.073	.295*	.262*	.160	1	.461**	.235	.492**
	Sig. (2-tailed)	.132	.579	.022	.043	.221		.000	.070	.000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60
x7	Pearson Correlation	.461**	.347**	.491**	.642**	.537**	.461**	1	.618**	.878**

	Sig. (2-tailed)	.000	.007	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60
x8	Pearson Correlation	.235	.300*	.333**	.393**	.369**	.235	.618**	1	.645**
	Sig. (2-tailed)	.070	.020	.009	.002	.004	.070	.000		.000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60
totalx	Pearson Correlation	.522**	.502**	.589**	.801**	.688**	.492**	.878**	.645**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		y1	y2	y3	y4	y5	y6	y7	y8	Totally
y1	Pearson Correlation	1	.234	.628**	.602**	.542**	.139	.443**	.220	.771**
	Sig. (2-tailed)		.072	.000	.000	.000	.289	.000	.091	.000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60
y2	Pearson Correlation	.234	1	-.013	.037	.336**	.147	.151	-.060	.309*
	Sig. (2-tailed)	.072		.921	.781	.009	.263	.248	.651	.016
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60
y3	Pearson Correlation	.628**	-.013	1	.710**	.562**	.228	.499**	.349**	.811**
	Sig. (2-tailed)	.000	.921		.000	.000	.080	.000	.006	.000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60
y4	Pearson Correlation	.602**	.037	.710**	1	.537**	.059	.426**	.436**	.787**
	Sig. (2-tailed)	.000	.781	.000		.000	.652	.001	.001	.000

	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	Pearson Correlation	.542**	.336**	.562**	.537**	1	.091	.471**	.181	.730**
y5	Sig. (2-tailed)	.000	.009	.000	.000		.489	.000	.166	.000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	Pearson Correlation	.139	.147	.228	.059	.091	1	.314*	.136	.319*
y6	Sig. (2-tailed)	.289	.263	.080	.652	.489		.014	.300	.013
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	Pearson Correlation	.443**	.151	.499**	.426**	.471**	.314*	1	.490**	.714**
y7	Sig. (2-tailed)	.000	.248	.000	.001	.000	.014		.000	.000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	Pearson Correlation	.220	-.060	.349**	.436**	.181	.136	.490**	1	.529**
y8	Sig. (2-tailed)	.091	.651	.006	.001	.166	.300	.000		.000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	Pearson Correlation	.771**	.309*	.811**	.787**	.730**	.319*	.714**	.529**	1
totaly	Sig. (2-tailed)	.000	.016	.000	.000	.000	.013	.000	.000	
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	60	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	60	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.753	9

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
x1	4.38	.524	60
x2	4.38	.524	60
x3	4.40	.527	60
x4	3.92	1.225	60
x5	4.50	.504	60
x6	4.38	.524	60
x7	4.43	.563	60
x8	4.45	.502	60
totalx	34.85	3.251	60

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
x1	65.32	39.000	.460	.741
x2	65.32	39.135	.438	.742
x3	65.30	38.519	.532	.736
x4	65.78	31.020	.715	.683
x5	65.20	38.027	.643	.730
x6	65.32	39.203	.428	.743
x7	65.27	36.165	.856	.711
x8	65.25	38.326	.596	.733
totalx	34.85	10.570	1.000	.772

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	60	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	60	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.778	9

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
y1	4.55	.534	60
y2	4.65	.481	60
y3	4.47	.536	60
y4	4.13	.769	60
y5	4.47	.503	60
y6	3.85	.444	60
y7	4.40	.558	60
y8	4.43	.533	60
totaly	34.67	2.509	60

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
y1	65.07	24.267	.720	.745
y2	64.97	26.948	.233	.782
y3	65.15	24.028	.767	.741
y4	65.48	22.423	.731	.728
y5	65.15	24.672	.684	.750
y6	65.77	26.894	.271	.780
y7	65.22	24.308	.676	.747
y8	65.18	25.542	.467	.765
totaly	34.95	8.048	.984	.796

Regression**Variables Entered/Removed^a**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	totalx ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: totally

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.748 ^a	.560	.552	1.679

a. Predictors: (Constant), totalx

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	207.809	1	207.809	73.707	.000 ^b
	Residual	163.524	58	2.819		
	Total	371.333	59			

a. Dependent Variable: totally

b. Predictors: (Constant), totalx

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14.550	2.353		6.183	.000
	Totalx	.577	.067	.748	8.585	.000

a. Dependent Variable: totally